



**GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 PILAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMATAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* pembangunan kependudukan, bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menetapkan peraturan bupati tentang *grand design* kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2046

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 NO. 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
4. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomo 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan presiden nomor 153 tahun 2014 tentang *grand design* pembangunan kependudukan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2048

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
8. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang

sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.

9. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
10. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
22. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
23. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
24. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
25. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

BAB II

VISI DAN MISI KEPENDUDUKAN

Bagian Satu

Visi

Pasal 2

Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2048 :

Bagian Dua

Misi

Pasal 3

Misi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

- (1) Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

- (2) Mewujudkan pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (3) Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
- (4) Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi
- (5) Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Kependudukan
Pasal 4

- (1) Strategi Pembangunan Keluarga
 - a. Strategi Dalam Upaya Membangun Keluarga Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
 - Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
 - Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama
 - b. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang sah
 - Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
 - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
 - Komitmen Pemerintah Indonesia yang mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
 - Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
 - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
 - c. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender
 - Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

- Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
 - Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
 - Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan
- d. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga
- Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga
 - Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun.
 - Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

(2) Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
- b. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah
- c. Mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka panjang
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran perkotaan
- e. Memperluas kesempatan kerja produktif bagi angkatan kerja baru
- f. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
- g. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
- h. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat

(3) Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan

- a. Pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah, hubungan kepada masyarakat dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business*. Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing*

research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.

- c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan

BAB III

GDPK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2046

Pasal 5

Grand Design Pembangunan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

Grand Design Pembangunan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 sebagaimana dimaksud pasal 5 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan
- Bab 2 : Analisa Situasi Kependudukan Dan Capaian Pembangunan
- Bab 3 : Proyeksi Penduduk Dan Situasi Ideal Kependudukan
- Bab 4 : Visi Dan Misi Serta Strategi Kependudukan
- Bab 5 : Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan
- Bab 6 : Road Map Kependudukan
- Bab 7 : Penutup

BAB IV

TIM KORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan Di Kabupaten Kotawaringin Barat di Bentuk Tim Kordinasi:
- (2) Tim kordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengkordinasikan dan menyingkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan.
- (3) Dalam mengkordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program *Grand Design* pembangunan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tim kordinasi memperhatikan

kebijakan dan Program *Grand Design* pembangunan kependudukan nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan Provinsi .

Pasal 8

Tim kordinasi pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk dengan Keputusan Bupati:

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dibentuk kelompok kerja
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas penduduk
 - c. Kelompok Kerja Bidang pembangunan keluarga
 - d. Kelompok kerja bidang penataan pesebaran dan pengaturan mobilitas penduduk
 - e. Kelompok Kerja Bidang kelembagaan dan pembangunan database kependudukan
- (3) Keanggotaan tim kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah dari OPD Terkait dan Lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal
PJ.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
ttd

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan wujud visi strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan dan pengelolaan kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kebijakan kependudukan merupakan perspektif melihat kedepan (forecasting policy), yang tentu akan dijumpai resiko, peluang, dan sekaligus tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 bukan hanya semata-mata sebagai dokumen perencanaan kependudukan formalitas. Lebih dari itu, GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan arah bagi pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembangunan kependudukan yang dapat mendukung pembangunan strategis Kabupaten Kotawaringin Barat.

Terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen penting ini dalam mendukung kebijakan pembangunan kependudukan yang baik kedepan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud, Tujuan	1-2
1.3 Ruang Lingkup	1-3
1.4 Pelaporan	1-7
1.5 Tenaga ahli	1-9
1.6 Metodologi	1-11

BAB 2 ANALISA SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

2.1 Wilayah Administrasi.....	2-1
2.2 Kependudukan	2-3
2.2.1 Kuantitas Penduduk	2-3
2.2.2 Kualitas Penduduk.....	2-7

BAB 3 PROYEKSI PENDUDUK DAN SITUASI IDEAL

3.1 Analisa Fertilitas Penduduk.....	3-1
3.1.1 Analisa Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk	3-5
3.1.2 Analisa Dependency Ratio (DR).....	3-10
3.1.3 Analisa Angka Kelahiran Kasar / Crude Birth Rate	3-10
3.1.4 Analisa Angka Fertilitas Umum / General Fertility Rate (GFr)	3-11
3.1.5 Analisa Angka Fertilitas Kelompok Umur/Age Specific Fertlity Rate (ASFR)	3-12
3.2 Analisa Mortalitas Penduduk	3-13
3.2.1 Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR).....	3-15
3.2.2 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR)	3-15
3.2.3 Angka Kematian Anak (Child Mortality Rate/CMR).....	3-16
3.2.4 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR)	3-17
3.3 Peningkatan Kualitas Penduduk	3-17
3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	3-17

3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM).....	3-19
3.3.3 Indek Pembangunan Manusia	3-21
3.4 Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	3-23
3.5 Pembangunan Keluarga Berkualitas.....	3-25
3.6 Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan	3-26
3.7 Situasi Ideal Kependudukan	3-27

BAB 4 VISI MISI DAN STRATEGI KEPENDUDUKAN

4.1 Visi dan Misi	4-1
4.2 Strategi Kependudukan.....	4-4

BAB 5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

5.1 Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan.....	5-1
--	-----

BAB 6 ROADMAP KEPENDUDUKAN

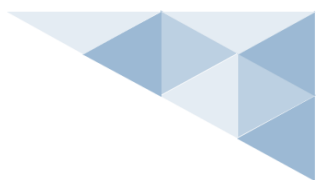
6.1 Kebijakan Dan Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	6-1
6.2 Kebijakan Dan Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk	6-4
6.3 Kebijakan Dan Roadmap Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	6-7
6.4 Kebijakan Dan Roadmap Pembangunan Keluarga	6-9
6.5 Kebijakan Dan Roadmap Pembangunan Manajemen Database Dan Informasi Kependudukan.....	6-10

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan.....	7-1
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2022.....	2-3
Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 -2022.....	2-4
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2022 (Jiwa)	2-4
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	2-5
Tabel 2.5 Angka Partisipasi Murni Tahun 2018 - 2022.....	2-7
Tabel 2.6 Angka Melek Huruf Tahun 2021 - 2022.....	2-8
Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022	2-9
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Fertilitas	2-10
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Mortalitas	2-11
Tabel 2.10 Pendapatan Daerah Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat (Dalam Milyar Rupiah)	2-16
Tabel 2.11 Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2-17
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021 2-18	
Tabel 3.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048.....	3-5
Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2048.....	3-6
Tabel 3.3 Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Selatan Tahun 2023-2048.....	3-7
Tabel 3.4 Proyeksi Penduduk Kecamatan Kumai Tahun 2023-2048	3-8
Tabel 3.5 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2048.....	3-8
Tabel 3.6 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2048.....	3-9
Tabel 3.7 Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2048	3-9
Tabel 3. 8 Proyeksi Dependency Ratio (DR).....	3-10
Tabel 3. 9 Proyeksi Crude Birth Rate (CBR)	3-11
Tabel 3. 10 Proyeksi General Fertility Rate (GFR)	3-12
Tabel 3. 11 Angka Fertilitas Kelompok Umur Tahun 2023.....	3-12
Tabel 3. 12 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2023	3-18
Tabel 3. 13 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2048	3-18
Tabel 3. 14 Angka Partisipasi Murni Tahun 2023	3-20
Tabel 3. 15 Angka Partisipasi Murni Hingga Tahun 2048	3-20
Tabel 3. 16 Indek Pembangunan Manusia 2023	3-21
Tabel 3. 17 Indek Pembangunan Manusia 2048	3-22



Tabel 3. 18 Pengarahan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk	3-23
Tabel 3. 19 Pembangunan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat	3-25
Tabel 3. 20 Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan	3-26
Tabel 6. 1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	1
Tabel 6. 2 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk	6
Tabel 6. 3 Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028.....	12

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	2-2
Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2018 - 2022.....	2-3
Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2018 – 2022.....	2-4
Gambar 2. 4 Grafik Perkembangan Apm Kabupaten Kotawaringin Barat	2-8
Gambar 2. 5 Grafik Perkembangan Ipm Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2-9
Gambar 2. 6 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat ..	2-18
Gambar 3. 1 Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2023-2048	3-6
Gambar 3. 2 Grafik Angka Partisipasi Kasar	3-18
Gambar 3. 3 Grafik Analisa Angka Partisipasi Kasar	3-19
Gambar 3. 4 Angka Partisipasi Murni Tahun 2023	3-20
Gambar 3. 5 Grafik Angka Partisipasi Murni Tahun 2048	3-21
Gambar 3. 6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia 2023.....	3-22
Gambar 3. 7 Grafik Indeks Pembangunan Manusia 2048.....	3-23



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi.

Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem

perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah penyusunan serta pemanfaatan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan.
- 3) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan kependudukan.
- 4) Mendorong terwujudnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan

c. Sasaran

Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah

1.3 RUANG LINGKUP

a. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi pekerjaan terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi:

Tahapan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Rencana Kerja GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Kajian Akademis GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun

- Penyusunan Visi-Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 25 Tahun
- Harmonisasi dan Penetapan Visi-Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- Penyusunan Naskah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- Penyepakatan Dokumen Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- Pengesahan dan Penetapan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
- Publikasi dan sosialisasi.
- Pelaporan.

Tahapan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Pengajuan dan penetapan SK Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Tim Pengarah dan Tim Penyusun GDPK 5 Pilar	Dibentuk melalui SK Kepala Daerah
2	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar • Pembagian kelompok kerja 	Rencana Kerja Penyusunan GDPK	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan disepakati oleh Tim Pengarah GDPK
3	Penyusunan Kajian akademis GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah • Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD • Telaah Program unggulan/prioritas pembangunan kependudukan nasional dan daerah • Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebijakan kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD) • Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan kewilayahan • Identifikasi pencapaian program pembangunan kependudukan daerah • Rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
			serta pencapaian program • Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah.	
4	Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dasar kependudukan • Pembahasan asumsi proyeksi dengan justifikasi pakar • Perhitungan proyeksi • Evaluasi data hasil proyeksi • Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi. • Penyusunan laporan hasil perhitungan • proyeksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter kependudukan 25 tahun • Perkiraan potensi dan dampak kependudukan 25 tahun • Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
5	Penyusunan visimisi dan arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun • Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun • Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Isu strategis kependudukan 25 tahun • Visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun • Arah kebijakan strategis dibidang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Peningkatan Kualitas Penduduk 3. Penataan Persebaran dan mobilitas penduduk 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Penataan Data dan Administrasi Kependudukan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD bersama <i>stakeholder</i> terkait
6	Harmonisasi dan penetapan visimisi serta arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Harmonisasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait • Penyepakatan visi- misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara penetapan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan yang ditandatangani Kepala Daerah 	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan pengarah GDPK dengan FGD bersama Kepala Daerah

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
	25 tahun			dan <i>stakeholder</i> terkait
7	Penyusunan Road-Maps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RoadMaps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun 	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
8	Penyusunan Naskah <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan Dokumen GDPK 5 Pilar sesuai dengan sistematika panduan • Editing dan layouting 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Draft GDPK 5 Pilar 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
9	Penyepakatan Dokumen Rancangan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Penyepakatan Rancangan naskah GDPK 5 Pilar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen GDPK 5 Pilar 	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
10	Pengesahan dan Penetapan Dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah 	Tim Penyusun dan Tim Pengarah dengan Kepala Daerah
11	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di publikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah 	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
12	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari • kepala daerah kemudian • di laporkan kepada Sekertariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat: • BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. • Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta • Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah 	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

1.4 PELAPORAN

Sistem pelaporan untuk penyajian buku laporan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan memuat: garis besar kondisi pekerjaan, pemahaman konsultan terhadap daerah pekerjaan, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal penugasaan tenaga ahli yang dilibatkan, daftar data yang sudah/belum dikumpulkan, rencana kerja yang akan dilaksanakan, permasalahan dan dokumentasi kondisi eksisting.

Laporan Pendahuluan diserahkan setelah paparan pendahuluan dilaksanakan dan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revisi dari tim teknis, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, dan berjumlah 2 (dua) eksemplar.

Substansi dari laporan pendahuluan terdiri atas metodologi dan rencana kerja serta hasil kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: tentang pengumpulan data, metodologi pendekatan pemecahan masalah, rencana kerja & progress analisa. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Laporan antara diserahkan dengan tekanan substansi pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan Gambaran Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) Tantangan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) Kondisi Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat yang diharapkan; dan
 - 4) Konsep Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Laporan Akhir memuat: Seluruh hasil kegiatan yang telah disetujui oleh peserta diskusi/pemberi tugas sesuai dengan KAK.

Laporan Akhir diserahkan setelah dilakukan perbaikan dari hasil paparan draft laporan akhir, yaitu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, dan berjumlah sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Tekanan substansi dari laporan akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arahan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Fokus dan Prioritas Program Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- 3) Rencana Aksi Penguatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat memuat seluruh isi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir yang sudah direvisi oleh tim teknis dan disetujui oleh PPK. Dokumen kajian harus diserahkan selambat-lambatnya: 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 8 (delapan) eksemplar.

Dokumen kajian juga harus dilengkapi dengan:

- 1) Dokumentasi yang memuat progress penyusunan dokumen kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- 2) Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah.

1.5 TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Penyedia jasa konsultansi harus menyediakan tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh PPK

1) Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana (S-1) Jurusan Teknik PWK/Planologi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan Mempunyai Sertifikat Muda PWK, berpengalaman sebagai team leader dalam pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) tahun, Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2) Ahli Ekonomi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 4 (empat) tahun. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

3) Ahli Sosial

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Sosial lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 4 (empat) tahun. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

4) Ahli Statistik

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Statistik lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 4 (empat) tahun. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan

dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

5) Asisten Ahli Perencanaan Wilayah

Asisten Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Teknik PWK/Planologi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun. Dengan tugas utama membantu tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 3 (tiga) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

6) Asisten Ahli Sosial

Asisten Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Sosial, lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun. Dengan tugas utama membantu tenaga ahli Ekonomi dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 3 (tiga) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.

7) Surveyor


Surveyor yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) semua jurusan lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan tugas utama dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.

8) Drafter

Drafter yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan tugas utama dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat.

9) Administrator

Administrator Komputer seorang Sarjana (S-1) semua jurusan yang berpengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan tugas utama dalam



mengadministrasikan seluruh kegiatan selama 4 (empat) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BAB 2. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

2.1 WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan Ibukota Pangkalan Bun.

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada 10 19' - 30 36' LS dan 1100 25' - 1120 50' BT. Adapun batas-batas wilayah secara administratif, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

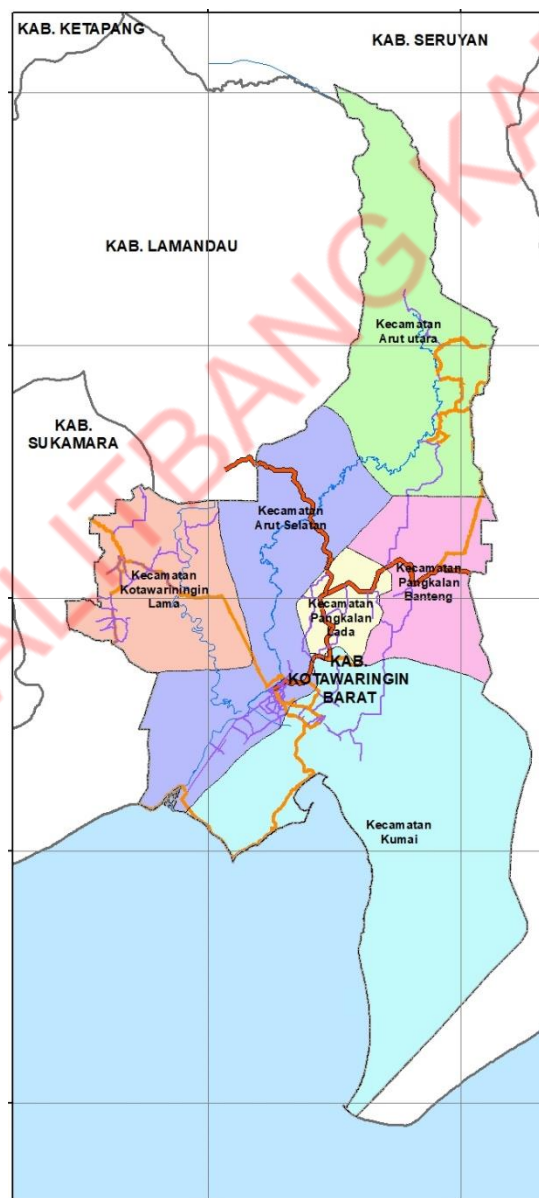
Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 9.584,85 km².

Seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat maka sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4 Kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai yaitu menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.921 km² (28,13 persen dari total luas kabupaten),

dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 229 km² (3,08 persen dari total luas kabupaten), serta terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

Kecamatan - Kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Arut Selatan (13 Desa dan 7 Kelurahan),
2. Kecamatan Kumai (15 Desa dan 3 Kelurahan),
3. Kecamatan Kotawaringin Lama (15 Desa dan 2 Kelurahan),
4. Kecamatan Arut Utara (10 Desa dan 1 Kelurahan),
5. Kecamatan Pangkalan Lada (11 Desa) dan
6. Kecamatan Pangkalan Banteng (17 Desa)



Gambar 2. 1 Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2 KEPENDUDUKAN

2.2.1 Kuantitas Penduduk

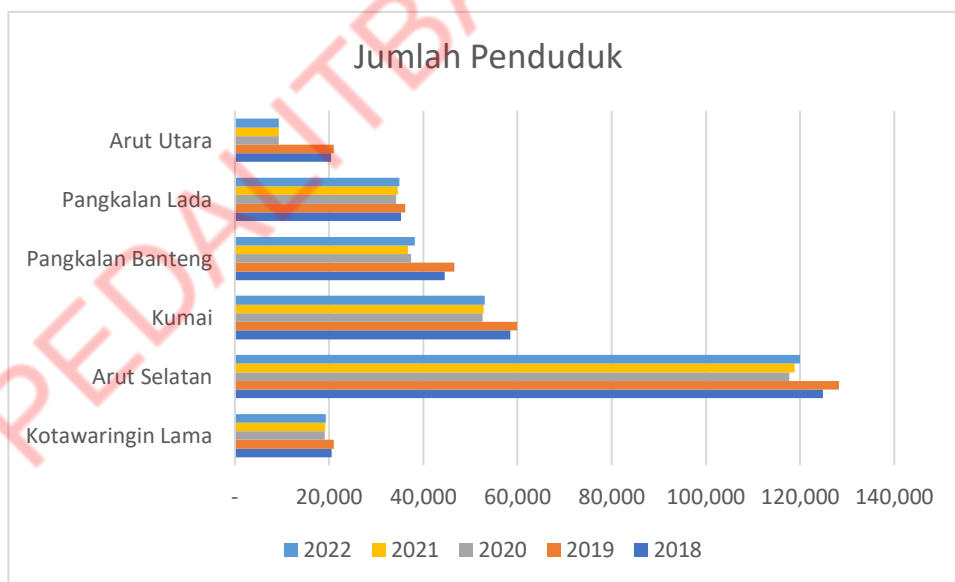
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki jumlah penduduk yang dinamis, seperti mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 menjadi 312.911 jiwa dan tertinggi dalam lima tahun kebelakang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan menjadi 270.300 jiwa, sekaligus merupakan jumlah penduduk terendah dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
01	Kotawaringin Lama	20.522	20.973	19.100	19.220	19.319
02	Arut Selatan	124.896	128.248	117.700	118.809	119.988
03	Kumai	58.460	59.950	52.600	52.821	53.054
04	Pangkalan Banteng	44.599	46.586	37.400	36.784	38.235
05	Pangkalan Lada	35.218	36.132	34.200	34.547	34.964
06	Arut Utara	20.387	21.022	9.300	9.350	9.375
	JUMLAH	304.082	312.911	270.300	271.531	274.935

Sumber : BPS, Kotawaringin Barat dalam Angka series 2019 – 2023



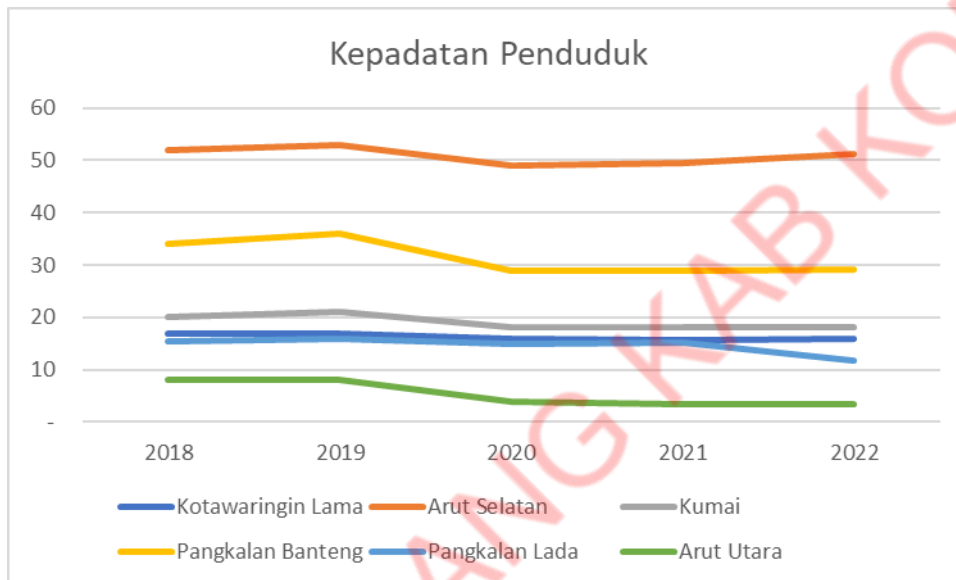
Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2018 - 2022

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, kecamatan terpadat adalah Kecamatan Arut Selatan dengan kepadatan mencapai 51 jiwa/km² pada tahun 2022 dan tertinggi pada tahun 2019 dengan 53 jiwa/km².

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 -2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
01	Kotawaringin Lama	17	17	16	16	16
02	Arut Selatan	52	53	49	50	51
03	Kumai	20	21	18	18	18
04	Pangkalan Banteng	34	36	29	29	29
05	Pangkalan Lada	15	16	14,9	15	12
06	Arut Utara	8	8	4	3	3
JUMLAH		146	151	131	131	130

Sumber : BPS, Kotawaringin dalam Angka series 2019 - 2023



Gambar 2. 3 Grafik Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2018 – 2022

B. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Umur

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diperinci jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Berikut adalah gambar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat menurut jenis kelamin:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2022

(Jiwa)

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	129.031	130.881	135.852	140.128	144.135
Perempuan	121.010	123.000	127.934	132.461	136.255
Jumlah	250.041	253.881	263.786	272.589	280.390
Sex Ratio	106,63	106,41	106,19	105,79	105,78

Sedangkan untuk struktur umur, Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022, jumlah tertinggi pada umur 10-14 tahun dengan jumlah 13.959 jiwa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan struktur umur di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Umur	Laki-laki	Perempuan
>74 Thn	1.508	1.321
70-74 Thn	1.708	1.202
65-69 Thn	2.805	2.198
60-64 Thn	4.639	3.653
55-59 Thn	6.378	5.605
50-54 Thn	9.068	7.259
45-49 Thn	10.694	9.471
40-44 Thn	12.307	11.055
35-39 Thn	11.112	12.155
30-34 Thn	10.748	10.816
25-29 Thn	11.058	10.897
20-24 Thn	12.180	11.062
15-19 Thn	10.862	8.886
10-14 Thn	13.959	12.550
5-9 Thn	13.616	12.491
0-4 Thn	11.493	9.134
Total	144.135	129.755



Berdasarkan piramida tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah kelahiran lebih sedikit bila dibandingkan dengan 14 atau 10 tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa tidak terjadi migrasi masuk dan ada kematian bayi/anak pada 14 atau 10 tahun yang lalu yaitu antara tahun 2008 sampai dengan 2012. Apabila pada tahun 2008-2012 jumlah kelahirannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022 dan tidak ada kematian bayi/anak, maka yang terjadi adalah adanya migrasi masuk pada kelompok umur 10-14.

Menarik untuk dicermati bahwa umur 65+ semakin sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 60-64. Ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat semakin panjang.

Dari piramida tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jumlah kelahiran dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu mengalami kenaikan. Untuk mempertahankan jumlah kelahiran yang tidak begitu signifikan kenaikannya tersebut dapat dilakukan dengan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan tingkat kelahiran melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu dilakukan pula peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, termasuk dalam rangka pendewasaan usia perkawinan pertama melalui peningkatan pemahaman dan peningkatan derajat kesehatan reproduksi remaja. Program ketahanan keluarga dengan pembinaan dan pelatihan kepada kader Bina Ketahanan Keluarga yaitu kader-kader Bina Ketahanan Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia dan Peningkatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana.

Agar jumlah penduduk dapat terkendali dan terencana dengan baik, maka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) perlu dilakukan. Banyak dokter spesialis kandungan menyebutkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak saja dapat mengendalikan kelahiran tetapi juga memiliki berbagai manfaat lainnya. Manfaat tersebut antara lain dapat menjaga kesehatan reproduksi, sehingga meminimalisis resiko penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi seperti kanker payudara, kanker serviks dan sebagainya.

2.2.2 KUALITAS PENDUDUK

A. Aspek Pendidikan

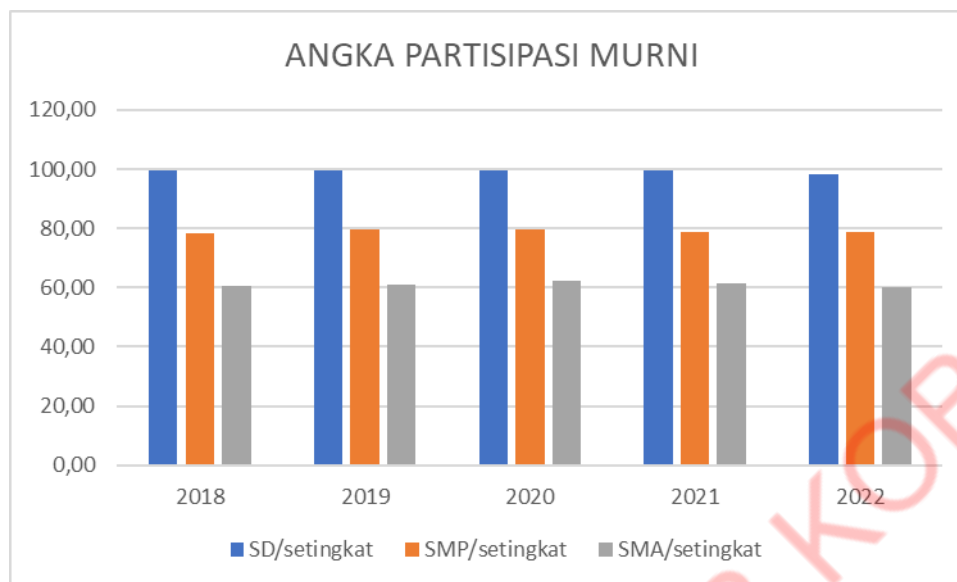
Pada aspek pendidikan, indikator angka partisipasi sekolah menjadi salah satu ukuran yang penting. Angka partisipasi sekolah (net enrollment rate) sendiri merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk, terutama usia muda yang masih sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Pada Angka partisipasi Murni (APM) atau net enrollment rate di jenjang SD menunjukkan perkembangan yang dinamis. Net enrollment rate pada jenjang SD/setingkat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. sejalan dengan jenjang SD, angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat masih memerlukan perbaikan. Dilihat dari angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat dan SMA/setingkat yang masih memerlukan dorongan untuk mencapai angka 100 persen. Angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 79,80 persen dan angka partisipasi murni jenjang SMA/setingkat tertinggi pada tahun 2020 sebesar 62,46 persen.

Tabel 2.5 Angka Partisipasi Murni Tahun 2018 - 2022

NO	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/setingkat	99,39	99,74	99,55	99,41	98,20
2	SMP/setingkat	78,18	79,80	79,60	78,89	78,89
3	SMA/setingkat	60,56	60,87	62,46	61,29	60,34

Sumber : BPS, Kotawaringin dalam Angka series 2019 - 2023



Gambar 2. 4 Grafik Perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat

Angka melek huruf menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca/tulis disuatu daerah dengan seluruh jumlah penduduk usia 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf merupakan pencapaian indikator dasar dari suatu daerah dalam memperluas ilmu pengetahuan, karena dengan membaca berarti penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan, maka penduduk mudah mengerjakan sesuatu termasuk dalam mencari pekerjaan. Dengan bekerja, maka kondisi ekonominya dapat meningkat dan tingkat kesejahteraannya juga semakin meningkat. Dengan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat diharapkan tingkat kemiskinan semakin berkurang.

Tabel 2.6 Angka Melek Huruf Tahun 2021 - 2022

	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf	98,36	100,00	99,61

Pembangunan sumber daya manusia menjadi indikator yang penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah dengan pembangunan industri dan pertanian yang cukup tinggi sehingga harus didukung dengan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu yang dapat menggambarkan hasil dari pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia.

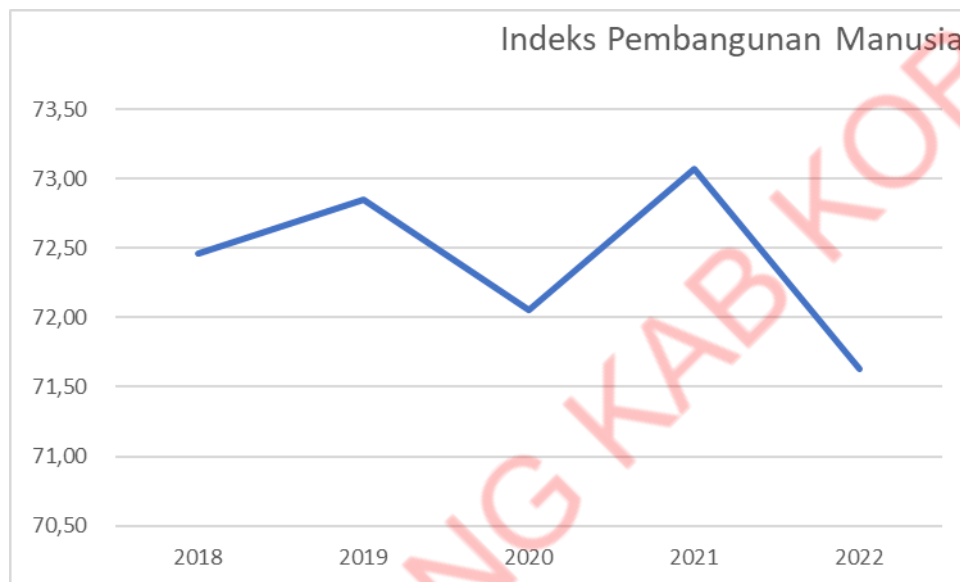
Menurut United Nation Development Program (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk.

Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan manusia dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	72,46	72,85	72,05	73,07	71,63

Sumber : BPS, Kotawaringin dalam Angka series 2019 - 2023



Gambar 2. 5 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Aspek Kesehatan

Fertilitas adalah komponen utama pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan. Indikator fertilitas penduduk diantaranya adalah usia perkawinan, program kehamilan, keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi.

Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor hipotetis perempuan.

Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

Keluarga berencana atau lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Dalam indikator keluarga berencana terdapat beberapa variabel, yaitu:

- Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.
- Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) adalah perbandingan antara pasangan usia subur yang aktif menggunakan alat kontrasepsi modern, dalam satuan persentase.
- KB Pasca Persalinan (PP) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/ alat/ obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan, sedangkan KB Pasca Keguguran (PK) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/ obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari.
- Peserta KB dibagi menjadi dua yaitu Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Fertilitas

JENIS DATA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kehamilan (Keseluruhan)	6.447	6.483	5.493	475	
Jumlah Kehamilan (Program KB)			5.221		426
TFR			2,28 %		
ASFR			44,9 %		
Unmeet Need					6.682
KB Pasca Salin					690
Peserta Aktif KB	35.045			23.323	25.567
mCPR				62.89	60.46
PUS (Pasangan Usia Subur)				37.080	42.286

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas P3AP2KB, 2023

Mortalitas adalah informasi penting bagi pemerintah dan swasta dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah juga dapat diketahui melalui indikator kematian. Dalam penyusunan grand design kependudukan, yang menjadi indikator kematian atau mortalitas adalah kematian ibu dan anak.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Mortalitas

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian ibu hamil	1	1	8	10	1
Jumlah kematin ibu melahirkan	3	4	3	5	1
Jumlah kematian ibu pasca melahirkan	9	2	1	2	7
Jumlah kematian anak dan bayi	33	28	43	34	60

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kematian anak dan bayi sangat dinamis dan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Sedangkan jumlah kematian ibu hamil tertinggi terjadi pada tahun 2021.

C. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami (Kepala keluarga), istri dan anaknya yang di sebut dengan Rumah Tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil; sedangkan yang disebut dengan keluarga besar selain suami, istri dan anak-anaknya dirumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah dan ibu dari pihak suami dan juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain termasuk orang tua dari ayah (Kakek dan nenek).

Menurut UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Harapan utama dari terbentuk dan terbinanya keluarga berkualitas adalah bagaimana menyiapkan anggota keluarga untuk menjadi insan yang berkualitas. Kualitas atau keunggulan yang dimiliki tentu saja akan menjadi modal utama bagi pembangunan dan dengan kualitas dimaksud anggota keluarga mampu memberikan peran yang baik dan berdaya guna. Kalau anggota keluarga adalah insan yang berkualitas, secara langsung atau pun tidak langsung mereka akan ikut mewarnai keadaan masyarakat secara keseluruhan, dan hal tersebut menjadi modal yang dibutuhkan untuk dapat menjawab berbagai persoalan atau tantangan yang muncul dalam kehidupan kedepannya.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Adapun tantangan pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah antara lain masalah perceraian, masalah Stunting, Perkawinan Usia Anak, Kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus hukum pada anak dan penyalahgunaan narkoba.

Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam mendukung program pembangunan keluarga, antara lain :

- Peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
- Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga
- Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga

Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak (lintas sektor dan pemerintah daerah), agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas.

D. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Masalah kependudukan klasik di Indonesia, selain jumlah penduduk yang besar, adalah persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar pulau, provinsi maupun antar desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk.

Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan peningkatan secara signifikan perkembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebaran kepadatan penduduk, di mana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Arut Selatan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hubungan antara migrasi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah bersifat resiprokal. Di satu pihak pola migrasi seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat memengaruhi volume dan arah migrasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan migrasi, sifat hubungan seperti ini harus menjadi perhatian.

E. Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (database) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat

didayagunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber.

Pertama, sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Kedua, survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Data kependudukan yang umum didapatkan dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan yang khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Di samping itu, Indonesia juga melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun. Ketiga, registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, dan RW. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk.

Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu. Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah.

Sumber masalah tersebut di antaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk

melaporkan kejadian demografis, menyebabkan data yang terkumpul underreporting. Persoalan yang perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat RW dan kelurahan, bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (database) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk membangun data dasar (database) kependudukan, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk).
 - Pencatatan biodata penduduk per keluarga;
 - Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - Pendataan penduduk rentan kependudukan;
 - Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.
2. Sistem Pencatatan Sipil (Capil).
 - Pencatatan kelahiran;
 - Pencatatan lahir mati;
 - Pencatatan perkawinan;
 - Pencatatan pembatalan perkawinan;
 - Pencatatan perceraian;
 - Pencatatan pembatalan perceraian;
 - Pencatatan kematian;
 - Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak;
 - Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
 - Pencatatan peristiwa penting;

- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.

F. Aspek Perekonomian

Pendapatan per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah sebagai hasil dari aktivitas ekonomi. Pendapatan per kapita di suatu daerah didapatkan melalui pembagian seluruh pendapatan regional (Product Domestic Regional Bruto) dibagi dengan seluruh penduduk di suatu daerah.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi pertumbuhan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menggambarkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Berdasarkan data BPS, pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 sebesar 58.627.047,97 dalam setahun. Jumlah pendapatan tersebut terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 menjadi 95.531.962,10 dalam setahun. Pertumbuhan pendapatan per kapita itu didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dan pertanian, kehutanan dan Perikanan.

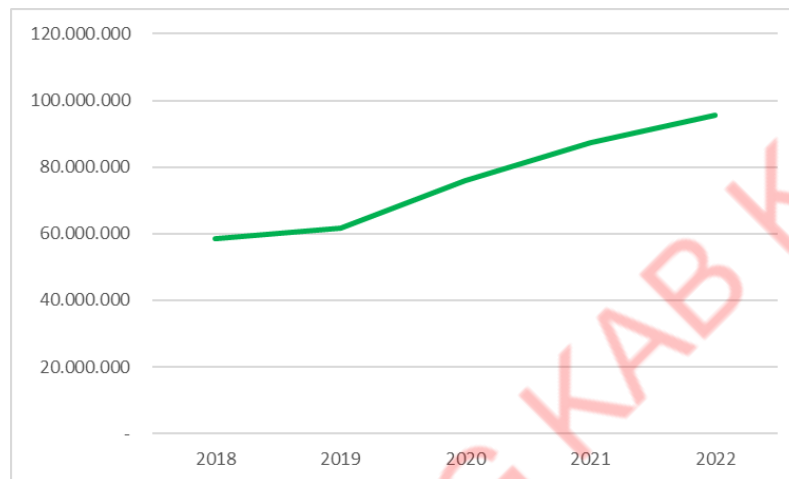
Tabel 2.10 Pendapatan Daerah Regional Bruto per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat (dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.433,64	4.617,06	5.197,45	6.233,23	6.969,13
2	Pertambangan dan Penggalian	225,81	256,31	257,57	265,24	280,77
3	Industri Pengolahan	4.554,00	4.754,48	5.211,62	6.411,98	7.094,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,16	10,27	11,48	12,17	13,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,74	18,11	17,83	20,08	21,34
6	Konstruksi	1.623,68	1.851,61	1.651,56	1.947,84	2.192,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.363,73	2.664,28	2.881,23	3.110,38	3.459,03
8	Transportasi dan Pergudangan	1.531,27	1.734,40	1.601,27	1.721,43	1.915,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242,90	267,31	259,87	270,27	291,70
10	Informasi dan Komunikasi	161,13	179,00	189,25	209,91	227,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	877,58	966,21	1.062,28	1.189,14	1.277,55
12	Real Estate	344,15	386,13	405,91	417,02	459,16
13	Jasa Perusahaan	8,45	9,48	8,40	8,76	9,73
14	Administrasi Pemerintahan	578,10	653,41	743,35	780,84	855,57
15	Jasa Pendidikan	472,20	533,64	583,25	613,22	634,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,21	231,51	301,93	357,67	397,22
17	Jasa Lainnya	177,68	198,89	137,63	139,56	166,86

No	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
	Total	17.827,43	19.332,10	20.521,88	23.708,74	26.265,08

Sumber : BPS, Kotawaringin dalam Angka series 2019 – 2023

PDRB per Kapita	2018	2019	2020	2021	2022
	58.627.047,97	61.781.465,02	75.922.604,51	87.315.039,54	95.531.962,10



Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat

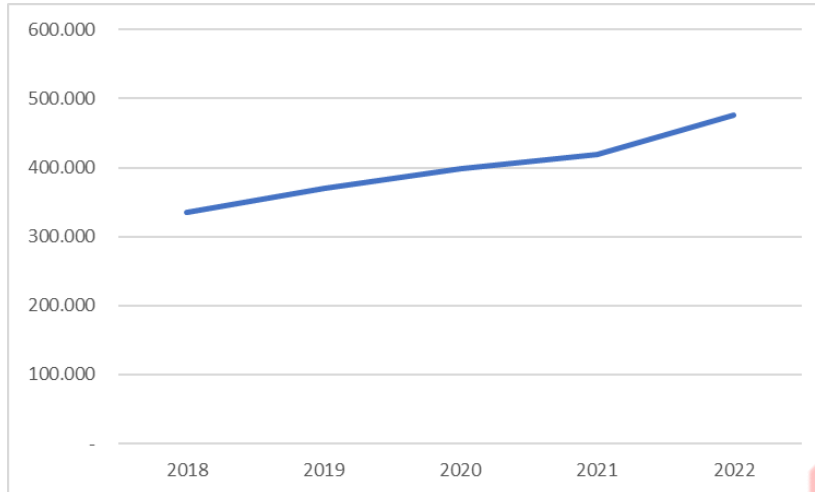
Berdasarkan definisi BPS, Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur melalui sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.11 Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (rupiah)	334.337	369.942	397.883	418.388	476.297

Sumber : BPS, Kotawaringin dalam Angka series 2019 - 2023

Garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2022. Hal ini dapat disebabkan oleh terus meningkatnya pendapatan per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat.



Gambar 2. 6 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

G. Aspek Sarana dan Prasarana

Transportasi merupakan salah satu prasarana utama dalam perkembangan wilayah, semakin mudah akses transportasi masuk dan keluar wilayah tersebut, semakin pesat perkembangan wilayah tersebut. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Infrastruktur jalan juga sangat menunjang keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terutama dikaitkan dengan aksesibilitas menuju ke sekolah. Akses jalan yang semakin baik memudahkan peserta didik ke sekolah serta efisiensi biaya dan waktu. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dalam jangka panjang dapat mendorong kinerja pendidikan yang lebih baik dan bermutu.

H. Program Kerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan

Capaian Kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2021 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.12 Capaian Kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Sarana RPJMD						
	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	74,66%	73,67%	79,90%	86,39%	85,10%

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Sasaran RENSTRA						
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik	82,67%	101,61%	66,70%	157,75%	88,58%
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (akta kelahiran)	63,7	74,41	84,62%	317,83%	94,35%
3	Jumlah Instansi yang memanfaatkan data	2	2	3	4	20
4	Rasio jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK SEM Kemendagri	1.207	1.287	1.317	1350	1350

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat, 2020 dan 2021



BAB 3 PROYEKSI PENDUDUK DAN SITUASI IDEAL KEPENDUDUKAN

3.1 ANALISA FERTILITAS PENDUDUK

Dalam proyeksi pengendalian kuantitas penduduk, terdapat beberapa aspek yang dilihat yaitu: *jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Dependency Ratio (DR), Gross Reproduction Rate (GRR), Net Reproduction Rate (NRR), Crude Birth Rate (CBR), Total Fertility Rate (TFR), Jumlah kelahiran, Infant Mortality Rate (IMR) laki-laki dan perempuan, Crude Death Rate (CDR), dan Jumlah Kematian*. Kondisi kependudukan yang diinginkan untuk jangka Panjang secara umum adalah tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hamper sama (seimbang) dengan mortalitas,

Kondisi kependudukan yang diinginkan untuk jangka Panjang secara umum adalah tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hamper sama (seimbang) dengan mortalitas, atau dapat dikatakan jumlah jumlah bayi yang dilahirkan diharapkan sama, atau hampir sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk cenderung tetap (stationer). Indikator tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah tercapainya Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate/NRR) sebesar 1 (satu), angka Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2,1 serta angka keikutsertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) minimal 70 persen. Angka Reproduksi Neto (NRR) adalah angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. Asumsi yang dipakai adalah bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas dan pola mortalitas ibunya. Angka NRR, TFR dan CPR tersebut di atas merupakan 3 syarat yang harus dapat dipertahankan selama 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk agar tercapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (BKKBN, 2007: 3).

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi seperti pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan gambaran struktur dan karakteristik penduduk. Hal ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum). Selain itu analisis terhadap penyebaran dan perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan memberikan gambaran dan arahan kendala serta potensi sumber daya manusia untuk keberlanjutan pengembangan, interaksi, dan integrasi dengan daerah di luar WP. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi demografi terhadap batasan daya dukung dan daya tampung WP dalam jangka waktu rencana. Analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan.

Hasil dari analisis kependudukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan rekomendasi rencana mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai obyek perencanaan. Tanpa analisis kependudukan, rencana yang dihasilkan akan menjadi rencana yang tidak valid dan susah diimplementasikan serta tidak terarah dengan baik karena urgensi penduduk sebagai subyek serta obyek pembangunan.

➤ **Kepadatan Penduduk**

Untuk mengetahui kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk mengetahui kepadatan penduduk di suatu perkotaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- Ⓔ Kepadatan penduduk bruto adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah
- Ⓔ Kepadatan penduduk netto adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah terbangun.

➤ **Persebaran Penduduk**

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui persebaran penduduk antara perkotaan dan perdesaan, serta antar unit wilayah. Dalam menganalisis persebaran penduduk dapat dibedakan menjadi persebaran penduduk perdesaan dan perkotaan, dan persebaran penduduk antar unit wilayah. Angka persebaran penduduk perdesaan dan perkotaan dapat diketahui melalui proporsi penduduk perdesaan dan perkotaan terhadap total jumlah penduduk. Sementara angka persebaran penduduk antar unit wilayah dapat diketahui dengan cara membandingkan kepadatan penduduk antar unit wilayah.

➤ **Perkiraan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Perkiraan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan metode *trend oriented*, namun dapat pula menggunakan metode target oriented.

Trend oriented planning adalah titik tolak berpikir yang memandang perencanaan sebagai suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kejadian di masa lampau dan kenyataan masa kini. Dalam hal ini perencanaan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran masa mendatang dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan dan tuntutan yang berkembang pada masa lalu; serta kebutuhan, permasalahan dan tuntutan masa kini.

Dalam proses perencanaan ini kecenderungan yang terjadi akan sangat penting sebagai pertimbangan untuk menentukan arah perkembangan di masa mendatang. Esensinya adalah menggunakan data masa lalu hingga masa sekarang (biasanya berupa data time series) untuk memprediksi kondisi di masa mendatang.

Apabila data yang ada di tingkat perkotaan cukup valid dan tersedia, maka untuk menentukan jumlah pertumbuhan penduduk di suatu perkotaan dengan metode trend oriented, dipengaruhi oleh :

- ⊙ Besarnya kelahiran
- ⊙ Besarnya kematian
- ⊙ Besarnya migrasi masuk dan keluar.

Keadaan penduduk pada tahun tertentu dapat dilukiskan sebagai berikut:

$$P_t = P_o + ((P_o ((B - D) + (M_i - M_o)) n)$$

Dengan:

P_t : Jumlah penduduk pada tahun t

P_o : Jumlah penduduk pada tahun dasar

B : Jumlah kelahiran

D : Jumlah kematian

M_i : Jumlah migrasi masuk

M_o : Jumlah migrasi keluar

$(B - D)$: Pertumbuhan penduduk alamiah

$(M_i - M_o)$: Pertumbuhan penduduk migrasi (neto)

Selain metode tersebut di atas, dapat dipergunakan pula metode analisis lainnya apabila data yang ada di tingkat perkotaan tidak terpenuhi (jumlah kematian, kelahiran, migrasi masuk dan migrasi keluar tidak ada). Metode tersebut antara lain :

ⓐ Model Linier (Polinomial)

Model linier digunakan dengan asumsi, tingkat pertumbuhan penduduk jumlahnya selalu konstan dari tahun ketahun. Bentuk matematis model linier adalah:

$$P(t+q) = P_t + b(q)$$

dimana:

$P(t+q)$: Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_t : Jumlah penduduk tahun dasar

b : Selisih tahun dari tahun dasar ke tahun $t+q$

q : Rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun.

ⓑ Model Bunga Berganda

Penggunaan model bunga berganda didasarkan pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun selalu proporsional dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Model bunga berganda adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

dimana :

P_t : Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_o : Jumlah penduduk tahun dasar

r : Prosen perkembangan

n : Tahun proyeksi.

ⓒ Model Regresi Linier

Model regresi linier digunakan dengan asumsi terdapat hubungan linier antara tahun pengamatan dengan jumlah penduduk pada tahun pengamatan yang bersangkutan. Model matematisnya adalah sebagai berikut:

$$P(t+x) = a + b(x)$$

Dimana:

$P(t+x)$: Jumlah penduduk tahun proyeksi

x : Tambahan tahun dihitung dari tahun dasar

a & b : Konstanta dengan rumus

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{N}$$

$$b = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}$$

$$N = \sum x^2 - (\sum x)^2$$

$$N. aPx - ax . aP$$

$$b = \frac{\quad}{\quad}$$

$$N. ax^2 - (ax)^2$$

Target oriented adalah titik tolak pemikiran yang lebih ditekankan semata-mata pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang. Dalam pendekatan ini suatu target ideal yang ingin dicapai di masa mendatang merupakan faktor penentu yang sangat penting. Target didasarkan pada keadaan masa kini untuk meningkatkan kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik di masa mendatang, dan sedikit sekali atau bahkan tidak memperhatikan kecenderungan yang terjadi di masa lalu dan masa kini.

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan membuat skenario masa depan yang ideal, kemudian langkah-langkah perencanaan dilakukan sebagai usaha untuk mencapai kondisi masa depan tersebut.

3.1.1 Analisa Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk

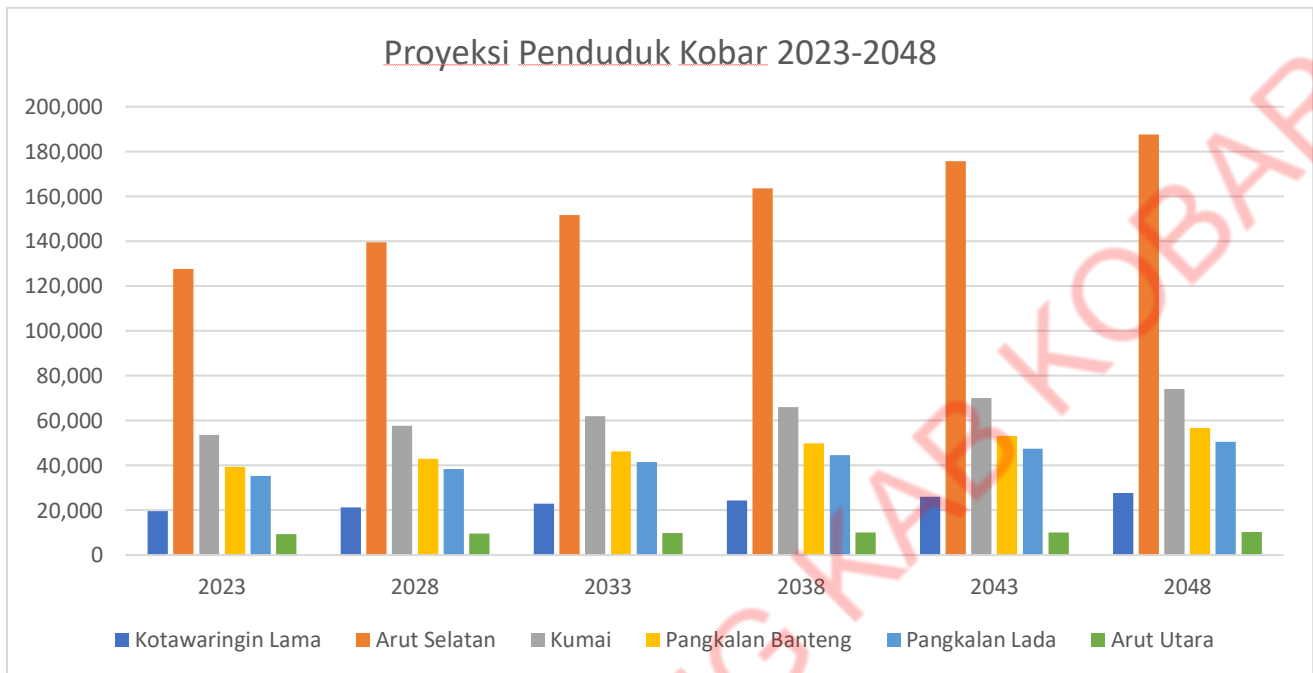
Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Analisa kependudukan dilakukan dengan Model regresi linier. Proyeksi jumlah penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana di suatu wilayah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan perhitungan harus memperhatikan perkembangan jumlah penduduk masa lampau, kecenderungan, arahan tata guna lahan, dan ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Metode yang digunakan adalah regresi linier (berdasarkan hasil pengujian dengan jasil simpangan terkecil) dengan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2048 meliputi:

Tabel 3.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048

Kecamatan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Kotawaringin Lama	19.614	21.233	22.851	24.469	26.087	27.705
Kec. Arut Selatan	127.584	139.588	151.592	163.596	175.600	187.604
Kec. Kumai	53.723	57.787	61.850	65.914	69.977	74.040
Kec. Pangkalan Banteng	39.385	42.859	46.332	49.805	53.279	56.753
Kec. Pangkalan Lada	35.218	38.305	41.392	44.479	47.566	50.653
Kec. Arut Utara	9.288	9.517	9.746	9.975	10.204	10.433

Kecamatan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
	2023	2028	2033	2038	2043	2048
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	284.813	309.288	333.763	358.238	382.714	407.190

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 1 Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2023-2048

Berdasarkan hasil Analisa kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2048 di prediksi jumlah penduduk tahun 2048 Kotawaringin Barat adalah 407.190 jiwa. Diprediksi terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan dari 284.813 jiwa menjadi 407.190 jiwa dengan persentase kenaikan jumlah penduduk mencapai 30,05% dalam jangka waktu 25 tahun atau kenaikan pertahun adalah 1,2% dari total jumlah kenaikan jumlah penduduk.

Kecamatan Arut Selatan masih memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 187.604 jiwa atau 46,07% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut table penjabaran proyeksi penduduk pada tiap desa di masing-masing kecamatan.

Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Kotawaringin Lama		19.614	21.233	22.851	24.469	26.087	27.705
1.	Babual Baboti	818	889	961	1.033	1.105	1.177
2.	Tempayang	836	876	915	955	995	1.035
3.	Sakabulin	840	920	1.000	1.081	1.161	1.241
4.	Kinjil	776	869	962	1.054	1.147	1.240
5.	Kotawaringin Hilir	3.910	4.264	4.617	4.970	5.324	5.678
6.	Riam Durian	2.256	2.520	2.785	3.049	3.314	3.579

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
7.	Dawak	778	812	846	881	915	949
8.	Kotawaringin Hulu	1.838	1.887	1.936	1.985	2.034	2.083
9.	Lalang	295	348	401	454	507	560
10.	Rungun	1.378	1.423	1.469	1.515	1.561	1.607
11.	Kondang	416	488	559	631	702	773
12.	Suka Mulya	1.307	1.413	1.519	1.626	1.732	1.838
13.	Sukajaya	930	992	1.054	1.116	1.178	1.240
14.	Suka Makmur	800	915	1.030	1.145	1.260	1.375
15.	Ipuh Bangun Jaya	919	980	1.041	1.102	1.163	1.224
16.	Sumber Mukti	674	755	837	918	1.000	1.082
17.	Palih Baru	845	881	918	954	991	1.028

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi pada Kecamatan Kotawaringin Lama berada di Desa Kotawaringin hilir dengan prediksi bertambah 1.768 jiwa hingga 2048 dengan jumlah penduduk 5.678 jiwa.

Tabel 3.3 Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Selatan Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Arut Selatan		127.584	139.588	151.592	163.596	175.600	187.604
1.	Tanjung Putri	731	793	855	917	979	1.041
2.	Kumpai Batu Bawah	2.107	2.172	2.236	2.301	2.365	2.429
3.	Kumpai Batu Atas	3.566	3.886	4.206	4.526	4.846	5.166
4.	Pasir Panjang	14.268	16.551	18.835	21.119	23.402	25.685
5.	Mendawai	11.577	11.621	11.665	11.709	11.753	11.797
6.	Mendawai Seberang	2.261	2.315	2.369	2.423	2.477	2.531
7.	Raja	5.887	5.986	6.085	6.185	6.284	6.383
8.	Sidorejo	19.941	21.491	23.040	24.589	26.138	27.687
9.	Madurejo	25.187	28.867	32.547	36.226	39.906	43.586
10.	Baru	27.495	30.124	32.753	35.383	38.012	40.641
11.	Raja Seberang	2.109	2.289	2.470	2.650	2.831	3.012
12.	Rangda	1.099	1.144	1.190	1.236	1.282	1.328
13.	Kenambui	892	1.015	1.138	1.262	1.385	1.508
14.	Runtu	2.542	2.798	3.055	3.311	3.568	3.825
15.	Umpang	1.286	1.403	1.519	1.636	1.753	1.870
16.	Natai Raya	2.035	2.262	2.488	2.715	2.942	3.169
17.	Medangsari	1.395	1.439	1.482	1.526	1.569	1.612
18.	Natai Baru	1.163	1.232	1.302	1.371	1.441	1.511
19.	Tanjung Terantang	889	943	998	1.052	1.106	1.160
20.	Sulung	1.154	1.256	1.358	1.459	1.561	1.663

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Selatan berada di Kelurahan Madurejo dengan prediksi bertambah 18.339 jiwa dengan total penduduk hingga tahun 2048 adalah 43.586 jiwa.

Tabel 3.4 Proyeksi Penduduk Kecamatan Kumai Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Kumai		53.723	57.787	61.850	65.914	69.977	74.040
1.	Sungai Cabang	893	986	1.079	1.172	1.265	1.358
2.	Teluk Pulai	363	392	420	449	477	505
3.	Sungai Sekonyer	509	539	570	600	630	660
4.	Kubu	3.831	4.087	4.343	4.599	4.855	5.111
5.	Sungai Bakau	1.740	1.855	1.970	2.084	2.199	2.314
6.	Teluk Bogam	1.313	1.365	1.418	1.470	1.523	1.576
7.	Keraya	511	523	535	547	559	571
8.	Sebuai	558	599	641	683	725	767
9.	Sungai Kapitan	6.490	7.426	8.362	9.299	10.235	11.171
10.	Kumai Hilir	8.031	8.514	8.997	9.480	9.963	10.446
11.	Batu Belaman	3.349	3.640	3.932	4.223	4.514	4.805
12.	Sungai Tendang	3.889	4.216	4.544	4.871	5.199	5.527
13.	Candi	4.156	4.317	4.479	4.640	4.802	4.964
14.	Kumai Hulu	7.328	7.648	7.967	8.286	8.605	8.924
15.	Sungai Bedaun	2.534	2.749	2.965	3.180	3.396	3.612
16.	Sebuai Timur	290	310	331	352	373	394
17.	Bumi Harjo	5.633	6.118	6.604	7.089	7.574	8.059
18.	Pangkalan Satu	2.305	2.500	2.694	2.888	3.082	3.276

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Kumai berada di Desa Sungai Kapitan dengan prediksi bertambah 11.171 jiwa dengan total perumbuhan penduduk hingga tahun 2048 adalah 11.171 jiwa.

Tabel 3.5 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Pangkalan Banteng		39.385	42.859	46.332	49.805	53.279	56.753
1.	Pangkalan Banteng	1.955	2.135	2.315	2.495	2.675	2.855
2.	Mulya Jadi	1.165	1.337	1.509	1.682	1.854	2.026
3.	Amin Jaya	7.808	8.115	8.422	8.729	9.036	9.343
4.	Natai Kerbau	1.699	1.878	2.058	2.238	2.418	2.598
5.	Karang Mulya	5.786	6.033	6.281	6.529	6.777	7.025
6.	Marga Mulya	1.819	2.031	2.243	2.455	2.667	2.879
7.	Arga Mulya	2.354	2.612	2.870	3.128	3.386	3.644
8.	Kebun Agung	1.428	1.570	1.711	1.853	1.994	2.135
9.	Sido Mulyo	2.072	2.352	2.632	2.912	3.192	3.472
10.	Simpang Berambai	1.946	2.203	2.460	2.716	2.973	3.230
11.	Sungai Hijau	2.208	2.511	2.813	3.116	3.418	3.720
12.	Sungai Bengkoang	3.167	3.522	3.877	4.232	4.587	4.942
13.	Sungai Kuning	1.646	1.843	2.041	2.238	2.436	2.634
14.	Sungai Pakit	2.569	2.818	3.067	3.316	3.565	3.814
15.	Berambai Makmur	449	460	471	483	494	505
16.	Sungai Pulau	728	847	966	1.085	1.204	1.323
17.	Karang Sari	586	591	595	600	604	608

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Pangkalan Banteng berada di Desa Amin Jaya dengan prediksi bertambah 1.535 jiwa hingga tahun 2048 diperkirakan jumlah penduduk menjadi 9.343 jiwa

Tabel 3.6 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Pangkalan Lada		35.218	38.305	41.392	44.479	47.566	50.653
1.	Purbasari	3.815	4.290	4.765	5.240	5.715	6.190
2.	Sungai Rangit Jaya	2.200	2.375	2.551	2.726	2.902	3.078
3.	Sumber Agung	3.490	3.779	4.068	4.357	4.646	4.935
4.	Lada Mandala Jaya	2.826	3.196	3.565	3.935	4.304	4.673
5.	Makarti Jaya	2.105	2.381	2.656	2.931	3.206	3.481
6.	Pandu Sanjaya	7.651	7.915	8.179	8.442	8.706	8.970
7.	Pangkalan Tiga	3.315	3.594	3.872	4.150	4.429	4.708
8.	Kadipi Atas	1.254	1.345	1.436	1.527	1.619	1.711
9.	Pangkalan Dewa	3.175	3.516	3.857	4.197	4.538	4.879
10.	Pangkalan Durin	2.604	2.925	3.246	3.567	3.888	4.209
11.	Sungai Melawen	2.782	2.990	3.198	3.406	3.614	3.822

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada berada di Desa Purbasari dengan prediksi bertambah 1.319 jiwa hingga tahun 2048 dengan prediksi jumlah penduduk 8.970 jiwa

Tabel 3.7 Proyeksi Penduduk Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2048

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
		2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Arut Utara		9.288	9.517	9.746	9.975	10.204	10.433
1.	Pangkut	4.257	4.321	4.386	4.451	4.515	4.579
2.	Nanga Mua	893	935	977	1.019	1.061	1.103
3.	Sukarami	693	694	695	696	696	696
4.	Gandis	488	493	498	502	507	512
5.	Kerabu	436	437	438	440	441	442
6.	Sambi	783	785	787	790	792	794
7.	Penyombaan	476	516	556	596	636	676
8.	Pandau	370	378	386	394	402	410
9.	Riam	307	365	423	481	539	597
10.	Panahan	427	430	433	436	439	442
11.	Sungai Dau	158	162	167	172	176	180

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Utara berada di Desa Pangkut dengan prediksi bertambah 322 jiwa hingga tahun 2048 dengan prediksi total jumlah penduduk 4.579 jiwa.

Berikutnya sebagai dasar dalam merencanakan penduduk maka perlu adanya Analisa terkait perkembangan penduduk berdasarkan umur hingga tahun 2048, berikut jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kelompok umur.

Tabel 3.8 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	2028	2033	2038	2043	2048
>74 Thn	3.017	3.205	3.393	3.581	3.769
70-74 Thn	3.252	3.594	3.936	4.278	4.620
65-69 Thn	5.267	5.531	5.795	6.059	6.323
60-64 Thn	8.677	9.062	9.447	9.832	10.217
55-59 Thn	12.358	12.733	13.108	13.483	13.858
50-54 Thn	17.277	18.227	19.177	20.127	21.077
45-49 Thn	20.734	21.303	21.872	22.441	23.010
40-44 Thn	24.160	24.958	25.756	26.554	27.352
35-39 Thn	23.010	22.753	22.496	22.239	21.982
30-34 Thn	21.849	22.134	22.419	22.704	22.989
25-29 Thn	22.669	23.383	24.097	24.811	25.525
20-24 Thn	24.369	25.496	26.623	27.750	28.877
15-19 Thn	20.630	21.512	22.394	23.276	24.158
10-14 Thn	28.448	30.387	32.326	34.265	36.204
5-9 Thn	27.176	28.245	29.314	30.383	31.452
0-4 Thn	21.701	22.775	23.849	24.923	25.997
	284.594	295.298	306.002	316.706	327.410

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan umur diketahui bahwasanya pada tahun 2048 sebagian besar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada usia 10-14 tahun hal ini tentunya sebagai bonus demografi yang baik akan diterima oleh Kabupaten Kotawaringin barat.

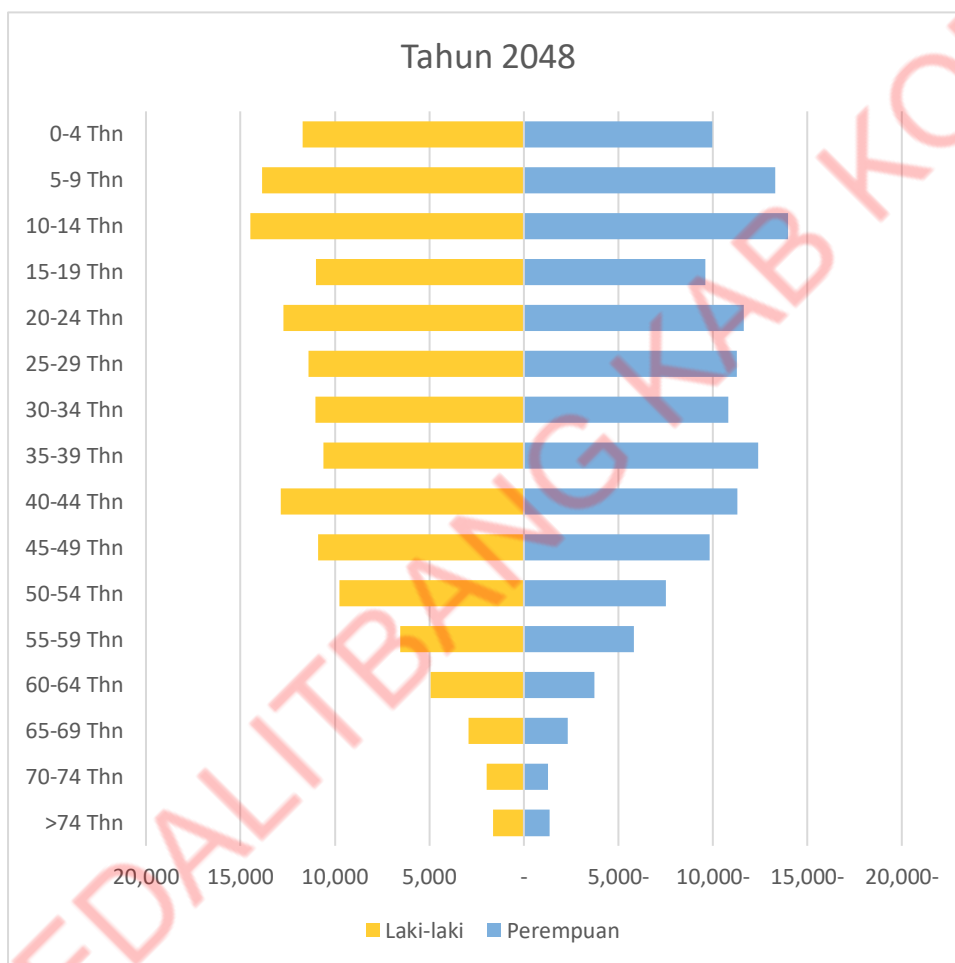
Berikut penjabaran tabel proyeksi penduduk kelompok umur berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan jenis kelamin

Tahun 2028			
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
>74 Thn	2.198	1.571	3.769
70-74 Thn	3.033	1.587	4.620
65-69 Thn	3.495	2.828	6.323
60-64 Thn	6.134	4.083	10.217
55-59 Thn	7.193	6.665	13.858
50-54 Thn	12.573	8.504	21.077
45-49 Thn	11.709	11.301	23.010
40-44 Thn	15.067	12.285	27.352
35-39 Thn	8.552	13.430	21.982
30-34 Thn	12.143	10.846	22.989
25-29 Thn	12.828	12.697	25.525

Tahun 2028			
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20-24 Thn	14.945	13.932	28.877
15-19 Thn	11.632	12.526	24.158
10-14 Thn	16.539	19.665	36.204
5-9 Thn	14.846	16.606	31.452
0-4 Thn	12.628	13.369	25.997
Total	165.515	161.895	327.410

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 2 diagram Analisa penduduk berdasarkan umur tahun 2048

3.1.2 Analisa Dependency Ratio (DR)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).. Berdasarkan hasil Analisa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 rasio ketergantungan memiliki nilai 44 artinya 100 Penduduk produktif menanggung 44 penduduk usia non produktif .

Tabel 3. 10 Proyeksi Dependency Ratio (DR)

2023	2028	2033	2038	2043	2048
83.985	87.651	91.318	94.984	98.650	102.317
189.905	197.229	204.554	211.878	219.202	226.527
44%	44%	45%	45%	45%	45%

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi dari rasio ketergantungan bahwasannya angka rasio ketergantungan hingga tahun 2048 mengalami kenaikan menjadi 45, hal tersebut tentu masih lebih tinggi dari pada angka rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 39,9 pada tahun 2035.

3.1.3 Analisa Angka Kelahiran Kasar / Crude Birth Rate

CBR atau angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran pada suatu periode per 1000 penduduk pada periode yang sama. Pada angka kelahiran kasar terdiri atas 3 katagori yaitu:

- Golongan tinggi: jumlah kelahiran di atas 30 per 1.000 penduduk
- Golongan sedang: jumlah kelahiran antara 20-30 per 1.000 penduduk
- Golongan rendah: jumlah kelahiran di bawah 20 per 1.000 penduduk

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Keterangan :

CBR = Angka kelahiran kasar

B = Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu

k = Bilangan konstanta, yaitu = 1.000

$$CBR = 4.374 : 284.813 \times 1000 = 15 \text{ jiwa}$$

Dengan hasil berikut maka CBR Di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 15 jiwa Artinya rata-rata kelahiran bayi pada tahun 2023 adalah 15 anak per 1000 Penduduk dan termasuk dalam katagori rendah. berikut table proyeksi CBR Kabupaten Kotawaringin Barat hingga tahun 2048 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Proyeksi Crude Birth Rate (CBR)

Tahun	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Proyeksi Penduduk	284.813	309.288	333.763	358.238	382.714	407.190

Tahun	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Angka Kelahiran Kasar /CBR	15 jiwa/ 1000 penduduk	16 jiwa/ 1000 penduduk	17 jiwa/ 1000 penduduk	18 jiwa/ 1000 penduduk	19 jiwa/ 1000 penduduk	20 jiwa/ 1000 penduduk

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi Crude Birth Rate diketahui hingga tahun 2048 angka kelahiran kasar adalah 15 jiwa/1000 penduduk, hal tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.1.4 Analisa Angka Fertilitas Umum / General fertility rate (GFR)

Angka Fertilitas Umum adalah banyaknya kelahiran pada suatu periode per 1.000 penduduk perempuan berumur 15–49 tahun atau 15–44 tahun pada pertengahan periode yang sama. Rumus GFR adalah sebagai berikut.

Cara perhitungan GFR dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$GFR = \frac{B}{P^f} \times k$$

Keterangan :

GFR = Angka Kelahiran Umum

B = Jumlah Kelahiran Hidup

P^f = Jumlah wanita usia reproduktif (15 – 49 tahun)

K = Bilangan Konstanta, biasanya 1000

B adalah banyak kelahiran pada suatu periode dan P^{15-49f} adalah jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama.

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa angka fertilitas umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$GFR = 4.374 : 153.303 \times 1000 = 29 \text{ jiwa}$$

Dengan hasil berikut maka GFR Di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 29 jiwa kelahiran pada wanita usia 15-49 tahun.

Pada kajian ini perlu memeperhitungkan angka fertilitas umum hingga tahun 2048, berikut tabel proyeksi angka fertilitas umum hingga tahun 2048.

Tabel 3. 12 Proyeksi General fertility rate (GFR)

2023	2028	2033	2038	2043	2048
153.303	158.245	163.186	168.128	173.069	178.011
29	31	33	35	37	39

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.1.5 Analisa Angka Fertilitas Kelompok Umur/Age Specific Fertlity Rate (ASFR)

Angka Fertilitas Kelompok Umur adalah banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu periode tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan periode yang sama. Rumus GFR adalah sebagai berikut Rumus TFR = 5x (ASFR1+ ASFR2+ ASFR3+.....ASFR7). berikut hasil perhitungan angka fertilitas kelompok umur Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023.

Tabel 3. 13 Angka Fertilitas Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Usia Wanita Subur	Kelahiran Bayi	ASFR
15-19	9869	511	52
20-24	11.194	772	69
25-29	11222	967	86
30-34	11110	958	86
35-39	11558	664	57
40-44	10748	463	43
45-49	9488	38	4

Kelompok Umur	Usia Wanita Subur	Kelahiran Bayi	ASFR
	75189	4374	398

Sumber: Hasil Analisa, 2023

= 5 X (52+69+86+57+43+4) = 5 X 398 = 1.990 Per 1000 wanita usia 15-49 Tahun = 1,9 per ibu. Artinya rata-rata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 2-3 anak hingga akhir masa reproduksinya

3.2 ANALISA MORTALITAS PENDUDUK

Dalam pengukuran mortalitas mati (*death*) adalah keadaan menghilangnya semua tandatanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sementara itu, sehat adalah suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang lengkap dan tidak sekadar kondisi dimana penyakit dan badan lemah absen (*a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity*). Artinya, seseorang dinyatakan sehat jika sehat jiwa, raga, dan sosial.

Analisis mortalitas bermanfaat untuk sebagai berikut;

1. Analisis status demografi saat ini dari suatu populasi serta konsekuensinya pada pertumbuhan penduduk.
2. Memenuhi kebutuhan administrasi kesehatan dan penelitian bagi institusi kesehatan dalam hubungannya dengan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan masyarakat.
3. Penentuan aksi dan kebijakan administratif dalam hubungannya dengan program-program institusi-institusi pemerintah yang bergerak di luar bidang kesehatan masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan akan informasi tentang perubahan penduduk dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan profesional dan komersial.
5. Pembuatan analisis perubahan penduduk pada masa lampau yang dibutuhkan untuk proyeksi penduduk dan karakteristik demografi lainnya untuk perencanaan kebutuhan fasilitas perumahan dan pendidikan, manajemen program jaminan social serta untuk produksi dan penyediaan pelayanan dan komoditas untuk berbagai kelompok penduduk.
6. Penentuan program-program pengendalian penyakit untuk perbaikan kesehatan masyarakat.
7. Memenuhi kebutuhan individu-individu akan dokumen kematian.

Seperti halnya pengukuran fertilitas, sumber data utama mortalitas adalah registrasi vital, sensus penduduk (SP) dan survei penduduk. Sistem registrasi vital merupakan sumber data mortalitas yang ideal jika kejadian kematian segera dilaporkan. Akan tetapi, terdapat permasalahan data kematian yang bersumber dari sistem registasi vital. Pertama adalah yang berkaitan dengan ketepatan definisi mati. Di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai contoh, kematian bayi segera setelah lahir dianggap "lahir mati" dan "lahir mati" dilaporkan sebagai "mati." Kedua adalah yang berkaitan dengan kelengkapan sistem registrasi, dimana tidak semua daerah dicakup dan tidak semua kejadian dilaporkan. Ketiga adalah yang berkaitan dengan tabulasi kematian menurut waktu/tempat pencatatan, bukan waktu/tempat kejadian. Sumber data mortalitas dari sensus/survei penduduk juga memiliki keterbatasan. Data kematian dicatat setelah kematian terjadi pada periode/waktu tertentu. Permasalahan yang timbul adalah masalah mengingat (*recall problem*), baik jumlah maupun waktunya. Permasalahan berikutnya adalah kejadian kematian jarang sehingga sampel untuk estimasi mortalitas harus besar.

Ukuran-ukuran mortalitas yang dibahas pada bagian ini meliputi angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, angka kematian perinatal, angka kematian neonatal, angka kematian paskaneonatal, angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian anak usia bawah lima tahun (*balita*), harapan hidup saat lahir, dan rasio kematian maternal.

3.2.1 Angka kematian kasar (*crude death rate/CDR*)

Adalah banyaknya banyaknya kematian pada suatu periode per 1.000 penduduk pada pertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung CDR adalah sebagai berikut.

$$\text{CDR} = \frac{\text{Jumlah kematian pada thn tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan thn tertentu}} \times 1000$$

$$\text{atau CDR} = \frac{D}{P} \times k$$

Keterangan :

- D = Jumlah kematian pada tahun tertentu
- P = Jumlah penduduk pertengahan tahun
- k = Bilangan konstanta, yaitu 1000

$$\text{CDR} = 1.536 : 274.935 \times 1000 = 5,5$$

Dengan hasil berikut maka CDR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Rata-rata adalah 5 orang per 1000 penduduk.

3.2.2 Angka kematian bayi (infant mortality rate/IMR)

Banyaknya kematian bayi (usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan)) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup padapertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung IMR adalah sebagai berikut

$$\text{IMR} = \frac{D}{B} \times k$$

Keterangan:
D = Kematian bayi usia di bawah 1 tahun pada tahun tertentu
B = Jumlah kelahiran hidup satu tahun tertentu
K = bilangan konstanta, yaitu 1000

$$\text{IMR} = 60 : 4.318 \times 1000 = 13,89$$

Dengan hasil berikut maka IMR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Rata-rata adalah 14 Jiwa kematian bayi per 1000 kelahiran bayi.

Berikut manfaat data IMR.

- 1) IMR berguna sebagai indikator status kesehatan anak, penduduk, dan kondisi ekonomi penduduk.
- 2) IMR menunjukkan tingkat kesehatan ibu, tingkat kunjungan ante-natal dan post-natal ibu dan bayi, kebijaksanaan KB, kondisi kesehatan lingkungan, serta tingkat dan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) IMR berkorelasi terbalik dengan status ekonomi orang tua, tanpa memandang ukuran status sosial dan ekonomi yang digunakan.
- 4) IMR turun sesuai dengan membaiknya standar hidup dan kondisi sanitasi dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 5) IMR mengukur probabilitas meninggal seseorang dari saat kelahiran sampai menjelang ulang tahunnya yang pertama.

3.2.3 Angka kematian anak (*child mortality rate/CMR*)

Adalah banyaknya kematian anak usia 1–4 tahun pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung CMR adalah sebagai berikut.

$$\text{CMR} = \frac{D}{P} \times k$$

Keterangan :

D = Jumlah kematian anak (1-4 tahun) pada tahun tertentu

P = Jumlah anak (1-4 tahun) pertengahan tahun tertentu

K = Bilangan konstanta, yaitu 1000

$$\text{CMR} = 60 : 12.273 \times 1000 = 4,8$$

Dengan hasil berikut maka CMR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Rata-rata adalah 4-5 Jiwa kematian anak per 1000 Kelahiran Anak.

Berikut adalah manfaat data CMR.

- 1) CMR menunjukkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak.
- 2) CMR tinggi pada keadaan salah gizi, higiene buruk, prevalensi penyakit menular tinggi, dan insiden kecelakaan di dalam atau sekitar rumah tinggi.
- 3) CMR lebih digunakan daripada AKB dalam mengukur tingkat kemiskinan.

3.2.4 Angka kematian Ibu (*maternal mortality ratio/MMR*)

Adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil, proses persalinan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan oleh sebab-sebab lain (misal: kecelakaan). Rumus untuk menghitung MMR adalah sebagai berikut.

$$\text{MMR} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu pada thn tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada thn tertentu}} \times 100.000$$

$$\text{MMR} = \frac{\text{DM}}{\text{B}} \times k$$

Keterangan :

DM = Kematian Ibu (*Mothers Death*)

B = Kelahiran Hidup

k = Bilangan konstanta, biasanya 100.000
(oleh karena kasusnya kecil)

$$\text{MMR} = 8 : 4.318 \times 1000 = 1,85$$

Dengan hasil berikut maka MMR Di Kabupaten Kotawaringin Barat Rata-rata adalah 2 Jiwa kematian Ibu per 1000 Kelahiran hidup

3.3 PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Proyeksi Grand Design Peningkatan Kualitas penduduk ini mencakup kurun waktu 2023 sampai dengan 2048 dengan periode lima tahunan. Beberapa indikator yang diproyeksikan dalam peningkatan kualitas penduduk adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, dan Pendapatan per Kapita.

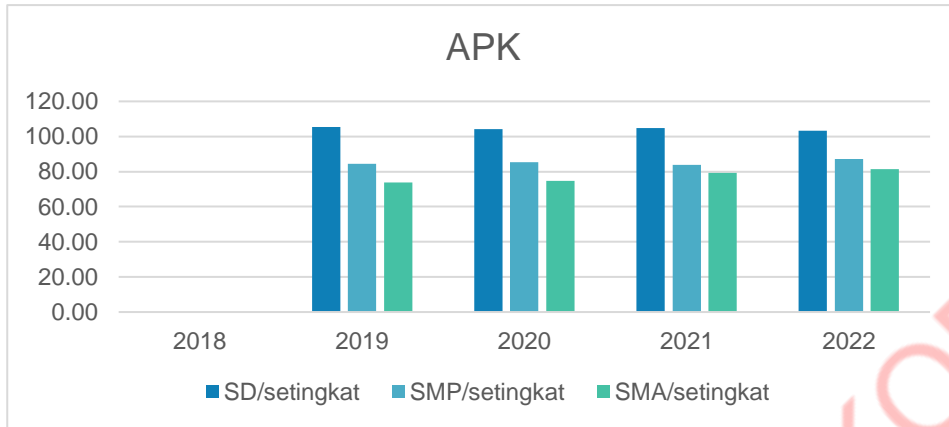
3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan.

Tabel 3. 14 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2023

APK	2018	2019	2020	2021	2022
SD/setingkat	-	105,43	104,16	104,7	103,22
SMP/setingkat	-	84,33	85,24	83,92	87,07
SMA/setingkat	-	73,79	74,81	79,34	81,51

Sumber: Hasil Analisa, 2023



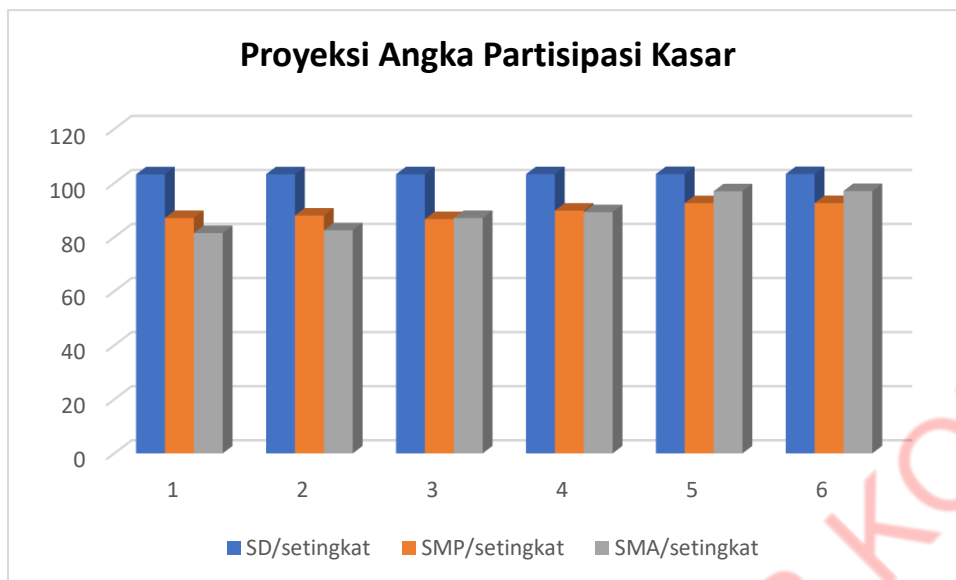
Gambar 3. 3 Grafik Angka Partisipasi Kasar

Berdasarkan angka partisipasi kasar tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui bahwasanya untuk angka partisipasi kasar Sekolah Dasar (SD)/ Setingkat memiliki nilai 103,22. Nilai tersebut tuun 1,48 dari tahun 2021 yaitu 104,71. Untuk angka partisipasi kasar SMP/Setingkat diketahui bahwa tahun 2022 memiliki nilai 87,07, hal tersebut meningkat dari tahun 2021 dengan nilai 3,15. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar SMA/Setingkat diketahui tahun 2022 memiliki niai 81,51.

Tabel 3. 15 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2048

APK	2022	2028	2033	2038	2043	2048
SD/setingkat	103,22	103,24	103,26	103,28	103,30	103,32
SMP/setingkat	87,07	87,98	86,66	89,81	92,55	92,58
SMA/setingkat	81,51	82,53	87,06	89,23	96,95	97,04

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 4 Grafik Analisa Angka Partisipasi Kasar

Berdasarkan angka partisipasi kasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048, diperkirakan angka partisipasi kasar pada tahun 2048 untuk SD/settingkat adalah 103,32, untuk SMP/Settingkat 92,58, dan untuk SMA/Settingkat 97,04.

3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

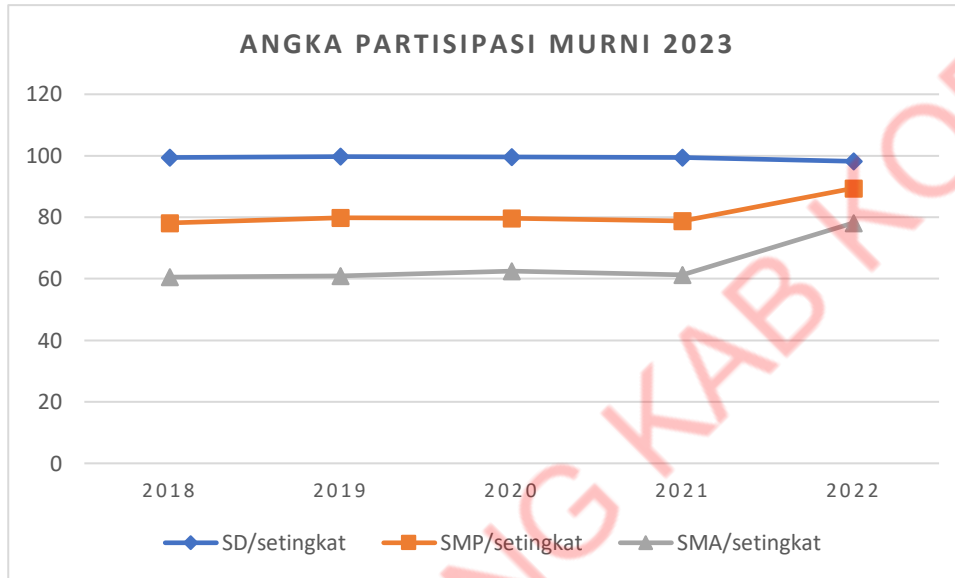
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan menghitung APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3. 16 Angka Partisipasi Murni tahun 2023

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/setingkat	99,39	99,74	99,55	99,41	98,20
SMP/setingkat	78,18	79,80	79,60	78,89	89,45
SMA/setingkat	60,56	60,87	62,46	61,29	78,19

Sumber: Hasil Analisa, 2023



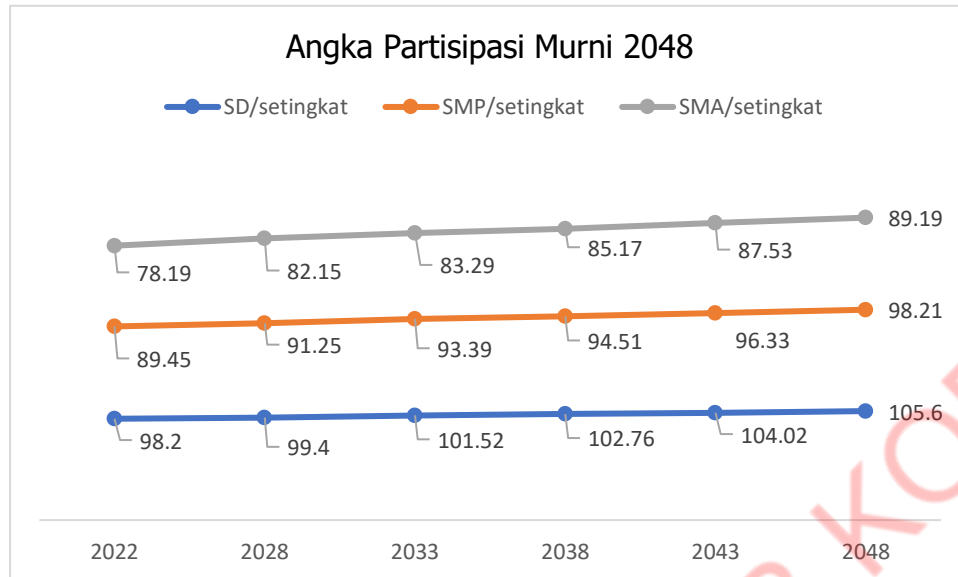
Gambar 3. 5 Angka Partisipasi Murni Tahun 2023

Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 untuk seluruh jenjang belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa masuk dan pindah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi. Untuk angka partisipasi murni jenjang SD/Setingkat adalah 98,20. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021, untuk SMP Setingkat adalah 89,45. Mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021. sedangkan SMA adalah 78,19, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021.

Tabel 3. 17 Angka Partisipasi Murni Hingga tahun 2048

Jenjang Pendidikan	2022	2028	2033	2038	2043	2048
SD/setingkat	98,20	99,40	101,52	102,76	104,02	105,60
SMP/setingkat	89,45	91,25	93,39	94,51	96,33	98,21
SMA/setingkat	78,19	82,15	83,29	85,17	87,53	89,19

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 6 Grafik Angka Partisipasi Murni Tahun 2048

Berdasarkan proyeksi angka partisipasi Murni tahun 2048 untuk jenjang SD/Settingkat adalah 105,6 untuk jenjang SMP/ Settingkat adalah 98,21 dan untuk jenjang SMA/ Settingkat adalah 89,19. Hal ini tentu perlunya kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SMP/ Settingkat dan SMA/Settingkat dikarenakan nilai belum mencapai 100.

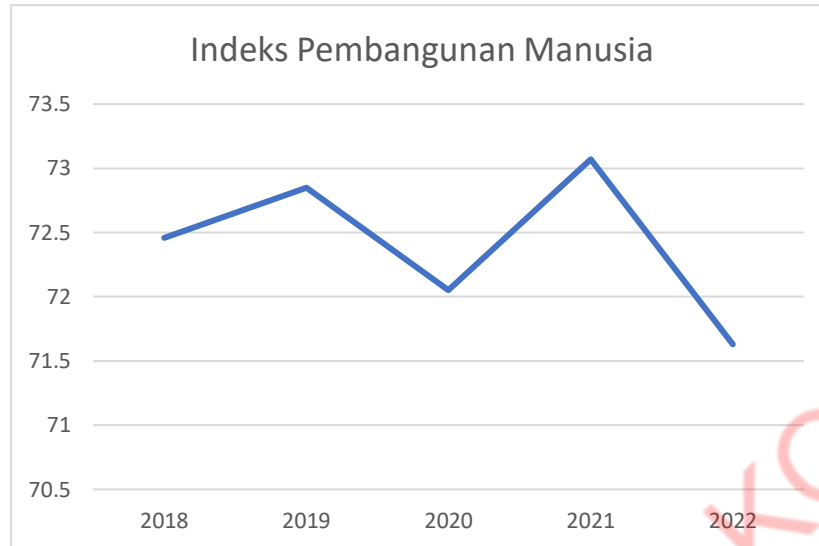
3.3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktulahir..

Tabel 3. 18 Indeks Pembangunan Manusia 2023

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	72,46	72,85	72,05	73,07	71,63

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 7 Grafik Indeks Pembangunan Manusia 2023

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2022 adalah 71,63, sedangkan pada tahun 2021 adalah 73,07 adanya penurunan IPM dari tahun 2021-2022, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan Pendidikan yang mengalami penurunan.

Dalam penentuan target IPM diperlukannya proyeksi dari indeks pembangunan manusia hingga tahun 2048, berikut tabel proyeksi indeks pembangunan manusia tahun 2048.

Tabel 3. 19 Indek Pembangunan Manusia 2048

INDIKATOR	2028	2033	2038	2043	2048
Indeks Pembangunan Manusia	74,15	76,75	78,11	79,07	81,21

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 3. 8 Grafik Indeks Pembangunan Manusia 2048

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2048 adalah 81,21, sedangkan pada tahun 2022 adalah 71,63 peningkatan IPM di barengi dengan proyeksi kesehatan dan Pendidikan tahun 2048 yang terus meningkat.

3.4 PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Penataan perseranan dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi; dan mengurangi mobilitas penduduk ke Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 20 Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Pokok-Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Memiliki Grand Design Kependudukan untuk mengantisipasi timbulnya masalah kependudukan pada masa yang akan datang terutama terkait dengan perpindahan dan pergerakan penduduk.					
Sosialisasi pembangunan yang berwawasan kependudukan dimana penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan pada daerah penyangga PKW kota Palangkaraya					
Tersedia infrastruktur (jalan, halte, stasiun kereta) dan yang memadai dan lengkap untuk memudahkan mobilitas komuter dan sirkuler					

Pokok-Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
penduduk PKW kota Palangkaraya dan wilayah sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat					
Tersedia sarana transportasi (bis kota, kereta, angkot) yang memadai dan lengkap untuk memudahkan mobilitas komuter dan sirkuler penduduk					
Sosialisasi, advokasi dan komunikasi mengenai kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;					
Pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;					
Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan					
Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah (desa-kota, kota-kota) dalam rangka Membangun Sistem Informasi Ketenagakerjaan					
Pelaporan data statistik penduduk migran permanen dan nonpermanen;					
Pengembangan sistem serta analisis database mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar Sistem Informasi Ketenagakerjaan					
Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;					
Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap efektivitas kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk					
Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka Panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.					
Pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan					
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.					
Peningkatan infrastruktur intra dan antar wilayah.untuk mengatasi permukiman kumuh					

Pokok-Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Review menyeluruh untuk memperkirakan dampak positif dan negatif kebijakan migrasi (lalu lintas penduduk)					
Penyiapan Sumber Daya Manusia yang kompeten berstandar internasional terutama bagi Pekerja Migran Indonesia					
Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia					
Pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing					
Pelaporan data statistik mobilitas dan migrasi penduduk pekerja					

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.5 PEMBANGUNAN KELUARGA BERKUALITAS

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelonggaran keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Tabel 3. 21 Pembangunan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat

Pokok Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental					
Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga					
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.					
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.					

Pokok Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.					
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.					

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.6 PENATAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN SERTA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tujuan dari penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan adalah terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 22 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Pokok-Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan (satu data untuk semua) menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan terkoneksi.					
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan dengan memanfaatkan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK).					
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge-base society</i>) tentang database penduduk					
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.					
Periode penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat kelurahan					

Pokok-Pokok	2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	2044-2048
Periode pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.					
Periode peningkatan pendayagunaan data dan Informasi kependudukan sebagai <i>Decision Support System (DSS) atau Sistem Pengambilan Keputusan (SPK)</i> dengan mempersiapkan Manajemen database, model database yang digunakan, dan pengelolaan dialog (user interface).					

Sumber: Hasil Analisa, 2023

3.7 SITUASI IDEAL KEPENDUDUKAN

Pengelolaan kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Kondisi ideal dari sisi kuantitas dalam jangka panjang akan tercapai jika Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hampir sama (seimbang) dengan mortalitas, atau dapat dikatakan jumlah jumlah bayi yang dilahirkan diharapkan sama atau hampir sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk cenderung tetap (stationer). Indikator tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah tercapainya Angka Reproduksi Neto (*Net Reproduction Rate/NRR*) sebesar 1 (satu), angka *Total Fertility Rate/TFR* sebesar 2,1 serta angka keikutsertaan ber-KB atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* minimal 70 persen.

Kondisi ideal kependudukan jika berdasarkan pada Penduduk Tumbuh Seimbang dari aspek pengelolaan kuantitas kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum tercapai. Pada tahun 2023, nilai TFR mencapai angka 1,9 lebih dari nilai TFR yang disyaratkan yaitu sebesar 2,1.

Kondisi ideal kependudukan juga ada yang sudah tercapai jika melihat aspek peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun juga ada aspek-aspek kualitas yang masih di bawah rata-rata. Masing - masing indikator peningkatan

kualitas menunjukkan tren yang meningkat dan menurun. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 6,51 tahun belum melebihi wajib belajar selama 12 tahun pada tahun 2023, demikian pula untuk Rata – rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2048 yang sebesar 9,30 tahun belum memenuhi wajib belajar selama 12 tahun. Untuk nilai Angka Partisipasi Kasar (APK), APK Sekolah Dasar atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat sudah mencapai kategori *Tuntas Paripurna dan Tuntas Utama* karena memiliki APK lebih dari atau sama dengan 95 persen dan APK 90 – 94 persen. Sedangkan APK Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2033 masuk kategori *belum tuntas* karena memiliki APK kurang dari 80 persen. Kemudian APK pada tahun 2038 yang sebesar 89,39 persen, masuk kategori *Tuntas Madya*. Sedangkan APK mulai tahun 2044 sampai dengan 2048 sudah masuk kategori *Tuntas Paripurna*. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. AHH merupakan angkat pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Jika menilik pada besarnya AHH menurut standar *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu umur yang berada di kisaran 25 tahun < AHH < 85 tahun maka AHH Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UNDP dengan besaran AHH berkisar dari 67– 73 tahun. Semakin lamanya Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya pendapatan per kapita daerah tersebut. Suatu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang tinggi juga. Dengan pendapatan yang tinggi, penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki pola hidup yang lebih baik, misalnya dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala, mengunjungi pusat kebugaran dan memilih bahan makanan yang memiliki kualitas terbaik serta terjaga dari sisi kebersihannya. Selain itu, pendapatan per kapita yang tinggi juga akan mendorong semakin tingginya jenjang Pendidikan yang dapat dicapai dan Angka Harapan Hidup yang semakin lama.



BAB 4. VISI DAN MISI DAN STRATEGI KEPENDUDUKAN

4.1 VISI DAN MISI

Grand design pembangunan kependudukan ialah suatu dokumen kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Dalam hal ini, grand design pembangunan kependudukan ialah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan (Prihantini, dkk., 2021).

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 merupakan perencanaan kebijakan strategis yang memiliki hubungan sistematis dengan Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga pembangunan ditingkatan lokal. Dengan konektivitas antara rencana dan tujuan pembangunan tersebut, maka dalam jangka Panjang GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tujuan peningkatan kondisi kependudukan yang berkualitas dalam mendukung Pembangunan Kependudukan Nasional yang berkelanjutan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka panjang, GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat juga bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang meliputi dukungan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pembangunan sistem informasi dan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.

Diharapkan dokumen GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijadikan landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional dalam upaya mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat serta mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka disusunlah visi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2048"

Visi Grand design pembangunan kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung visi dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, & Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka mencapai visi tersebut, disusunlah misi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Mewujudkan pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
3. Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
4. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi
5. Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya

Pembangunan kependudukan merupakan upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan. Hal tersebut juga terlihat dalam isi Dokumen Arah kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang memuat tentang:

1. Pembangunan Kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama.
2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat, daerah maupun masyarakat.
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.
4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disamping dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional, Grand Design Pembangunan Kependudukan Kalimantan Tengah 2023- 2048, Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan lain yang telah ada dan masih berlaku seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, Rencana Tata Ruang serta Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan. Oleh karena itu, Keterkaitan Isu isu Strategis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan disusun dengan berpedoman pada cita-cita bangsa termasuk didalamnya cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berlandaskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dilakukan melalui penyerasian kebijakan yang meliputi dengan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pembangunan manajemen data base dan informasi penduduk.

4.2 STARETGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka

diperlukan upaya apa aja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat menjawab sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja terutama di sektor pelayanan publik.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.


A. Strategi Pembangunan Keluarga

1. Strategi Dalam Upaya Membangun Keluarga Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
 - Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
 - Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama
2. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang sah
 - Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
 - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga

- Komitmen Pemerintah Indonesia yang mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
 - Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
 - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
3. Membangun keluarga berketahanan, sejatera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender
- Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 - Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
 - Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
 - Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga
- Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga
 - Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun.
 - Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

B. STRATEGI PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
2. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah
3. Mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka panjang

- 
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran perkotaan
 5. Memperluas kesempatan kerja produktif bagi angkatan kerja baru
 6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
 7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
 8. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat

C. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN

1. Pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah, hubungan kepada masyarakat dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business*. Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing research, e-payment, e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
3. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.



BAB 5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dirumuskan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat. Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2048”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah bidang pembangunan kependudukan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode dalam rangka mencapai sasaran guna mewujudkan visi dan misi pada Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Untuk menjaga konsistensi dan relevansi antara visi, misi, tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi. Strategi dan kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk

Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
- Meningkatkan advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan keluarga berencana

Arah Kebijakan

Pengaturan Fertilitas

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan

2. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga
4. Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan
5. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana
6. Peningkatan Pendidikan dan peran wanita
7. Peningkatan kesertaan KB pria; dan

Penurunan Mortalitas

1. Penurunan angka kematian ibu hamil
 2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
 3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan
 4. Penurunan angka kematian bayi dan anak
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, pembangunan Ekonomi

Kebijakan

Meningkatkan akses dan pelayanan Pendidikan, kesehatan serta kemandirian ekonomi

Arah Kebijakan

Pendidikan

1. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi siswa
2. Peningkatan layanan pendidikan non-formal dan formal dengan prinsip link and match
3. Mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antar usia wajib belajar
4. Peningkatan keahlian literasi, inovasi, teknologi, dan kreativitas
5. Peningkatan intensitas pelatihan kerja terpadu

Kesehatan

1. Penurunan angka kematian
2. Peningkatan angka harapan hidup
3. Penurunan angka gizi buruk
4. Penurunan angka stunting
5. Peningkatan pola hidup sehat masyarakat

Ekonomi

1. Meningkatkan status ekonomi penduduk dengan prinsip perluasan kesempatan kerja untuk Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Produktif
2. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara berkelanjutan
3. Peningkatan pendapatan penduduk melalui pengembangan mata pencaharian hidup yang berkelanjutan

4. Mengembangkan ekonomi regional berbasis pada pengembangan on demand ekonomi dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi.

3. Pembinaan dan peningkatan kemandirian berkeluarga

Kebijakan

Meningkatkan efektifitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga

Arah Kebijakan

1. Penanggulangan kemiskinan daerah beserta rencana aksi
2. Peningkatkan kemitraan dengan merangkul dan meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan berbasis keluarga
3. Peningkatkan pemahaman pesetaraan gender
4. Peningkatkan ketahanan keluarga
5. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah

4. Penataan pengelolaan mobilitas penduduk

Kebijakan

Meningkatkan penataan dan pengarahan mobilitas penduduk

Arah Kebijakan

1. Peningkatkan peran aktif perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penduduk yang akan dating
2. Peningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja daerah
3. Melakukan kordinasi dengan camat dan kepala desa untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap penduduk rentan maupun pendatang

5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

Kebijakan

Meningkatkan kualitas administrasi dan database kependudukan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan sarana dan prasarana administrasi penduduk
2. Peningkatan layanan secara online
3. Pengintergrasian data pada system informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pemanfaatan data kependudukan bagi pemerintah untuk mendukung kegiatan yang berbasis data kependudukan



BAB 6. ROAD MAP PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan, antara lain, dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk yang terarah. Dalam kaitan itu, aspek penataan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

6.1 Kebijakan dan Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Road Map GDPK pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2045 masa akhir GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah kondisi dimana terciptanya pertumbuhan penduduk seimbang dengan kondisi stasioner. Faktor resiko dan peluang juga menjadi pilihan utama dalam penyusunan Road Map GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat menjadi basis perencanaan dan data bagi terciptanya target jangka pendek dan panjang pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 6. 1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Jumlah Penduduk	284.813	309.288	333.763	358.238	382.714	407.190
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,03	1,11	1,19	1,27	1,37	1,47
Rasio Ketergantungan/ Dependency Ratio (DR)	44,22%	44,44%	44,64%	44,83%	45,00%	45,17%
Angk Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate (CBR)	15	16	17	18	19	20

Indikator	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Angka fertilitas umum/ General fertility rate (GFR)	29	31	33	35	37	39
Angka kelahiran kelompok umur/ Age Specific Fertlity Rate (ASFR)	398	383	368	353	338	323
Fertilitas total/ Total Fertility Rate (TFR)	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8	3
Angka Reproduksi Kotor/ Gross Reproduction Rate (GRR)	1,10	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07
Angka kematian kasar/ Crude Death Rate (CDR)	5,5	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5
Angka Kemantian Bayi/ Infent mortality rate (IMR)	14	12	10	8	6	4
Angka Kematian Anak/ Childhood mortality Rate (CMR)	4,8	3,8	2,8	2,2	1,51	1
Angka Kematian Ibu/ Maternal Mortality Rate (MMR)	185	160	135	120	105	90

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Untuk itu, Road Map ini berjalan dengan sistematis apabila evaluasi sasaran pada periode lima tahunan, kebijakan dan strategi, dan program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dengan target sebagai berikut:

**Road Map
2023-2028**

- Terkendalinya Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

**Road Map
2034-2038**

- Tercapainya kondisi kependudukan dengan kondisi stasioner (pertumbuhan penduduk seimbang)

**Road Map
2044-2048**

- Tercapainya kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP)

**Road Map
2029-2033**

- Terkendalinya Jumlah Penduduk dengan Kuantitas Konstan Menurun

**Road Map
2039-2043**

- Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai syarat tercapainya kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan

Gambar 6. 1 Road Map Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk

Adapun indikator pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Total Fertility Rate (TFR)
3. Jumlah kebijakan (peraturan daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk
4. Rata-rata jumlah anak per keluarga
5. Rasio akseptor KB

6. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
7. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Dalam jangka panjang kondisi yang ingin dicapai adalah tercapainya pertumbuhan penduduk yang stabil dan tidak begitu besar. Dalam mencapai hal ini perlu untuk menyeimbangkan antara jumlah kelahiran bayi dengan jumlah kematian. Kondisi yang ingin dicapai ini disebut juga kondisi yang stasioner. Melalui kondisi ini diharapkan akan terjadi penurunan rasio ketergantungan yang mana jumlah penduduk yang produktif akan lebih besar dari pada penduduk non produktif sehingga dapat memberikan kontribusi pada perekonomian.

Namun kondisi itu bisa menjadi masalah jika tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan distribusi dan penyediaan sumber daya yang memadai dalam mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas jumlah penduduk dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Industri dan Perdagangan.

6.2 Kebijakan dan Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat menitikberatkan pada pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Road Map peningkatan kualitas penduduk merupakan ukuran dan sasaran baik kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sampai pada periode akhir GDPK tahun 2048.

Road Map peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berfokus pada Dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sasaran Road Map peningkatan dalam jangka panjang akan menciptakan penyelarasan antara kuantitas penduduk yang seimbang dengan kualitas penduduk yang ada, terutama dalam menghadapi bonus demografi.



Gambar 6. 2 Road Map Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bonus demografi yang terjadi harus diikuti dengan pengembangan kualitas penduduk sehingga bonus demografi tersebut bisa memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal itu, pengembangan kualitas penduduk dapat dilihat peningkatan angka partisipasi sekolah di kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, 16 – 18 tahun dan 19 – 24 tahun. Selain itu, pada aspek pendidikan yang lain, peningkatan kualitas penduduk juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah. Sebagai contoh, peningkatan kualitas penduduk yang diinginkan dalam pendidikan adalah tercapainya angka partisipasi sekolah 100 persen di kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun pada tahun 2045. Hal ini tentu sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada aspek kesehatan, kondisi yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan itu ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi. Ditargetkan dalam 25 tahun mendatang angka itu menurun dan tidak ada kasus kematian

bayi. Sejalan dengan hal itu, untuk bayi yang menderita gizi buruk juga akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Bahkan, kondisi yang ingin dicapai pada 2048 tidak ada lagi bayi gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi yang ingin dicapai pada angka hidup sejalan dengan perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Dalam aspek ekonomi, pada tahun 2048 mendatang, kondisi yang diharapkan tercapai adalah *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat dan pendapatan per kapita penduduk meningkat 50 persen. Hal ini sangat mungkin dicapai bila mengingat peluang Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada pada wilayah strategis yang menghubungkan pusat-pusat industri dan bisnis di Jawa Timur. Dalam hal angka atau tingkat kemiskinan dan rasio gini, kondisi yang ingin dicapai pada 2045 adalah terjadi penurunan pada kedua variabel ini dimana untuk rasio gini diharapkan berada pada angka 0,25 dan tingkat kemiskinan di kisaran 1,00 persen. Untuk tingkat pengangguran diharapkan akan terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,00 persen. Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia ditargetkan akan terus naik sampai pada 85,00 di tahun 2048 mendatang.

Tabel 6. 2 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Indikator	2023	2028	2033	2038	2043	2048
PENDIDIKAN						
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	9,13	9,83	10,60	11,37	12,14
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7 – 12 Tahun	98,48	98,44	98,40	98,36	98,32	98,28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13 – 15 Tahun	99,14	106,13	113,60	121,61	130,18	139,35
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun	42,39	34,75	28,50	23,36	19,16	15,71
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Sederajat	103,22	103,24	103,26	103,28	103,30	103,32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	87,07	87,98	86,66	89,81	92,55	92,58
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas/Sederajat	81,51	82,53	87,06	89,23	96,95	97,04
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	98,20	99,40	101,52	102,76	104,02	105,60

Indikator	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS (%)	89,45	91,25	93,39	94,51	96,33	98,21
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA (%)	78,19	82,15	83,29	85,17	87,53	89,19
Pendapatan per Kapita (Rp)	32.561.800	35.404.800	38.247.800	41.090.800	43.993.800	46.776.800
KESEHATAN						
Prevalensi diabetes	1,96%	1,81%	1,68%	1,56%	1,46%	1,37%
Prevalensi hipertensi	13,73%	12,64%	11,72%	10,92%	10,22%	9,60%
Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,09	71,64	72,19	72,74	73,29	73,84
Bayi Gizi Buruk	1,38%	1,14%	1,02%	0,87%	0,72%	0,51%
PEREKONOMIAN						
Persentase pertumbuhan ekonomi	5,75	6-63	6,4-6,7	6,8-7,1	7,2-7,5	7,5-7,8
IPM	72,17	74,15	76,75	78,11	79,07	81,21

Sumber: Hasil Analisa, 2023


6.3 Kebijakan dan Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas

Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan regional dan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 pada pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan juga daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Mobilitas dalam konteks dinamika pembangunan kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah resiko *sub-urban shocking*, dimana kondisi ini terjadi karena pembangunan dan dinamika perkotaan tidak dapat menampung perkembangan baik dari sisi jumlah penduduk dan kualitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka panjang.

Pasal 16 menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi/kab/kota pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas



penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan kewilayahan.

Untuk itu road map penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2048 dijelaskan sebagai berikut;

Road Map
2023-2028

- Penataan Persebaran Penduduk antar Kecamatan dengan Pendekatan Pusat Perkotaan dan Non-Pusat Perkotaan

Road Map
2034-2038

- Tercapainya pengarahannya gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang tata ruang perkotaan.

Road Map
2044-2048

- Tercapainya persebaran Penduduk yang merata dengan menyeimbangkan pengendalian migrasi



Gambar 6. 3 Road Map Sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dalam hal persebaran dan mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terciptanya persebaran penduduk yang merata sesuai daya dukung dan daya tampung di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menurunnya angka migrasi netto antar Kabupaten/Kota. Dalam rangka untuk mewujudkan persebaran penduduk yang baik itu, membuat fasilitas-fasilitas publik mudah untuk dijangkau oleh seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kebijakan yang baik untuk diterapkan. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk semakin meningkat di seluruh Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.4 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga dalam GDPK Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi

sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun road map sasaran untuk setiap periode sampai pada tahun 2045 dijelaskan sebagai berikut;

Gambar 6. 4 Road Map Sasaran Pembangunan Keluarga



6.5 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya kebijakan dan roadmap pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan database dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan berbasiskan pada fakta dan data (*evidence based policy making*). Adapun tahapannya dapat dilaksanakan dalam periode tahun 2021- 2045 dijelaskan sebagai berikut;

Road Map
2023-2028

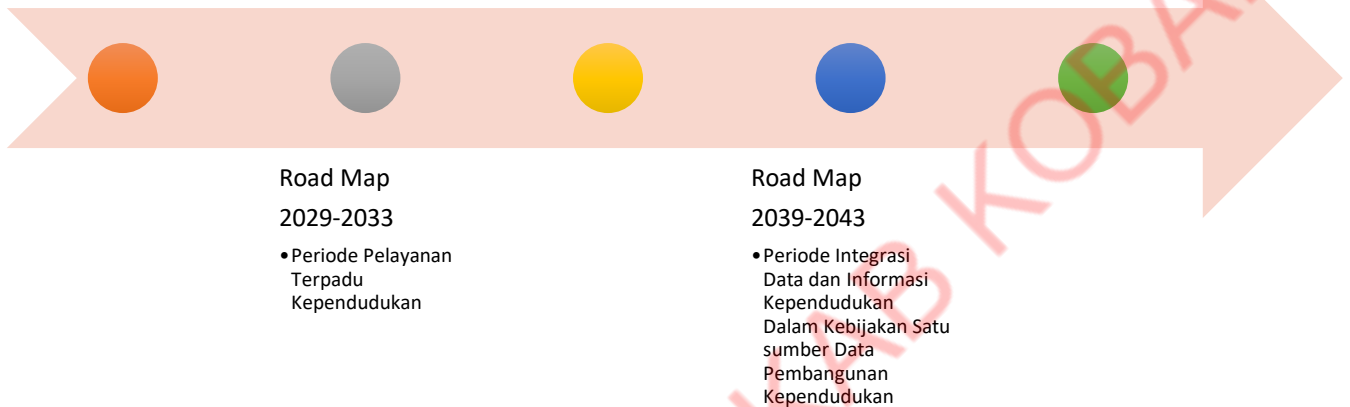
- Pemetaan dan Perencanaan Awal Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Road Map
2034-2038

- Periode Pengembangan Informasi dan Data Kependudukan Terpadu dalam Mendukung Evidence Based Policy

Road Map
2044-2048

- Periode Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi yang Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan



Gambar 6. 5 Road Map Sasaran Kebijakan Pembangunan Sistem Informasi dan Data Administrasi Kependudukan

Berdasarkan road map kebijakan pembangunan kependudukan yang telah disusun, adapun operasionalisasi tahun 2023-2048 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 6. 3 Operasionalisasi kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota					
			Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota					
			Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pemberdayaan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
		Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota					
			Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota					
			Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)					
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal					
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat)					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
Program Rehabilitasi Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial						
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial						
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
			Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan Kb (Pkb/Plkb)					
			Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga					
Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga								
Urusan Pemerintahan Wajib Yang	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat)					
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial					
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial					
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)					
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota					
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)					
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
			Penataan Pendaftaran Penduduk					
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil						
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun 2023-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043	Tahun 2044-2048
			Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan					
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

Sumber: Hasil Rencana, 2023



BAB 7. PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi. Kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.

Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan pusat daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan

yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka komitmen pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian.

Diperlukan sinergi dan keterpaduan program antara upaya pengendalian jumlah penduduk, untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Diperkuat jejaring (networking) kebijakan dan program antar pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan kependudukan tidak terlepas dari aspek lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, persebaran penduduk dan pemerataan ekonomi. Permasalahan kependudukan juga berkaitan erat dengan persoalan pembangunan nasional yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Penduduk menjadi modal penting dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari pentingnya peran penduduk, maka perlu dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Barat merujuk pada dokumen pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap). Diharapkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di bidang pembangunan kependudukan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta sektor terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan, yang menjadi bagian integral dari Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sehingga diperlukan koordinasi serta sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Rekomendasi kegiatan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum dapat dibagi per pilar sebagai berikut:

Pengelolaan Kuantitas Penduduk. Prioritas program berkaitan dengan pengelolaan kuantitas penduduk adalah sebagai berikut :

- ✦ Berdasarkan hasil proyeksi yang telah dihitung, Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat namun berbanding negatif dengan *Dependency Ratio* semakin berkurang terhitung sejak lima tahun pertama. Keuntungan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah fase Bonus Demografi yang sudah terjadi ini relatif baru terjadi jika dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah sehingga masih ada waktu untuk memanfaatkan secara optimal tetapi perlu diperhatikan juga adanya antiklimaks dari pemanfaat Bonus Demografi di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Leading sector* pada aspek ini adalah Bapelitbangda didukung oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan DP3AP2KB.

- ✦ Jika melihat kriteria angka kelahiran kasar dengan nilai CBR=20 maka Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk kategori angka kelahiran yang Rendah (kurang dari 40). Nilai Crude Birth Rate (CBR) dari mulai tahun 2023 sampai dengan 2048 menunjukkan tren peningkatan dengan angka kelahiran yang termasuk kategori rendah. Prioritas pembangunan dalam pengelolaan kuantitas penduduk adalah agar bisa menekan jumlah kelahiran. Dengan demikian Program keluarga berencana tetap harus terus menerus digalakkan. *Leading sector* aspek ini adalah DP3AP2KB didukung oleh mitra lini lapangan serta Dinas Kesehatan.
- ✦ Trend LPP yang meningkat didukung angka kelahiran bertambah dan angka mortalitas (kematian) yang relatif rendah, juga prediksi naiknya Migrasi Masuk (in) akibat pembangunan Kotawaringin Barat maka sekali lagi isue pengelolaan kuantitas penduduk sangat diperlukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Leading sector* aspek ini adalah DP3AP2KB, Dinas Kesehatan dibantu dengan mitra lini lapangan (Kader KB, Kader Posyandu serta lembaga masyarakat terkait aspek kesehatan)
- ✦ Dalam rangka pemanfaatan masa Bonus Demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan menjadi prioritas yang penting ditengah tengah tingginya kompetisi dalam memasuki dunia kerja. Fakta Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki akses tinggi dengan wilayah lain, berdampak kepada kesiapan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat agar bisa mengambil posisi penting dalam dunia kerja. *Leading Sector* aspek ini adalah Dinas Pendidikan didukung oleh Dinas Ketenaga kerjaan serta sector sector lain terkait ketenaga kerjaan/pariwisata.

Peningkatan Kualitas Penduduk. Prioritas program diantaranya ditekankan pada aspek pendidikan dan kesehatan yakni sebagai berikut :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Leading Sector aspek ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja didukung oleh Dinas Kesehatan serta sektor lain terkait kualitas penduduk.

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk. Prioritas program persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagai berikut:

- ✦ Memiliki Grand Design Kependudukan pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk dapat mengantisipasi timbulnya masalah kependudukan pada masa yang akan datang. Hal ini terlihat dari bertambahnya Laju Pertumbuhan Penduduk akibat adanya mobilitas penduduk ke Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
- ✦ Perlu tersedia infrastruktur (jalan, halte, stasiun kereta) dan sarana transportasi (bis kota, kereta, angkot) yang memadai lengkap, untuk memudahkan mobilitas sirkuler penduduk. Hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan dengan melibatkan pihak swasta.
- ✦ Pengembangan sistem serta analisis database mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pengumpulan dan pengembangan sistem database serta analisis data mobilitas/ persebaran penduduk ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- ✦ Pelaporan data statistik mobilitas dan migrasi penduduk pekerja. Pelaporan data ini dalam rangka penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah kabupaten/kota dari waktu ke waktu untuk mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai ke desa/kelurahan;

Leading Sector aspek ini adalah Bapelitbangda dan didukung oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS serta Perguruan Tinggi.

Pembangunan Keluarga Berkualitas. Prioritas program pembangunan keluarga yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- ✦ Peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
- ✦ Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga
- ✦ Peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Leading Sector aspek ini adalah DP3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.

Prioritas program penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan sebaiknya difokuskan kepada:

- ✦ Penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- ✦ Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan terutama Akta Kelahiran; ▪ Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- ✦ Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan pembangunan sistem data dan informasi kependudukan sebagian besar sudah dapat dilaksanakan pada periode I yakni periode tahun 2023-2028. Pokok-pokok yang terdata dapat dilaksanakan di periode awal ini adalah :

- ✦ Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan (satu data untuk semua) menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan terkoneksi.
- ✦ Periode pelayanan prima administrasi kependudukan dengan memanfaatkan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- ✦ Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Leading Sector aspek ini adalah BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, seluruh OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hingga tingkat desa.